jogja istimewa

PEMERINTAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN AKHIR

Perubahan RENSTRA 2022-2027

Rencana Strategis Perangkat Daerah

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2026

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DPRD
Jalan Malioboro 54 Yogyakarta Telepon (0274)512688, 512820,560293, 565622 Faksimile (0274) 580692 e-mail: setwan@dprd-diy.do.id website:dprd-diy.go.id Kode Pos: 55213

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 189 / SK-SEKRET / DPRD / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkewajiban memfasilitasi Penyusunan Anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. bahwa pada tahun 2022-2027 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan dimaksud dalam huruf b perlu dibentuk Tim Kerja Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2022-2027;
d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum sebagai berikut:

1.	Heri Legowo, S.S.,M.Ec.Dev.	Ketua
2.	Rani Arinasari, S.E.I.	Sekretaris
3.	Fuadi, S.E	Anggota
4.	Yustina Handayani W., S.H.,L.L.M.	Anggota
5.	Celly Cicellia, S.IP., M.PA	Anggota
6.	Nurina Salsabila, A.Md.	Anggota

KEDUA : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Menyiapkan, mengumpulkan, menganalisis dan mengolah data terkait dengan perubahan rencana strategis tahun 2022-2027;
2. Mengkompilasi dan menyiapkan konsep dokumen perencanaan berupa perubahan Rencana Strategis OPD dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang ada;
3. Melakukan entry data usulan anggaran 5 tahun melalui Jogja Plan BAPPEDA dan RKA-OPD dalam aplikasi SIPD.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 cq. Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA SETWAN

Drs. IMAM PRATANADI, M.T.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Anggota Tim Kerja.

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas Ridho dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2022-2027 dapat diselesaikan dengan baik.

Atas terselesaikannnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 yang dipergunakan sebagai bahan acuan atau pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun, tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY
2. Tim Penyusun dari Sekretariat DPRD DIY

Semoga bantuan yang telah diberikan pada kami *Insya Allah* mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Demikian Perubahan Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 yang dapat disusun. Semoga dapat menjadi bahan acuan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang telah digariskan.

Yogyakarta, 8 Juni 2026
Sekretaris DPRD DIY,

PEMERINTAH DAERAH ★ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ★ SETWAN

YUDI ISMONO, S.Sos.,M.Acc.
NIP. 197107171996031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika 6

II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 7

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 7

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD 9

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY 18

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY 25

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY 27

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 28

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota 31

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 31

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis 32

III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 33

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 33

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan 34

IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 44

4.1 Program – program 44

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan 45

V PENUTUP 104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY 7
Tabel 2. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Pendidikan 10
Tabel 3. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural 11
Tabel 4. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Ketugasan 11
Tabel 5. Komposisi Outsourcing Sekretariat DPRD berdasarkan Ketugasan 12
Tabel 6. Kebutuhan Pegawai sesuai Kualifikasi Jabatan pada Kepgub DIY No 94 Tahun 2026 12
Tabel 7. Kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD DIY 2026 17
Tabel 8. Sarana Prasarana Peralatan di Sekretariat DPRD DIY 2026 17
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD DIY Tahun Anggaran 2026 18
Tabel 10. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY pada Renstra Tahun 2017 – 2022 20
Tabel 11. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan 21
Tabel 12. Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Renstra Tahun 2017-2022 23
Tabel 13. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 33
Tabel 14. Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 34
Tabel 15. Analisis SWOT 38
Tabel 16. Rumusan Strategi 39
Tabel 17. Daftar Risiko Strategis 40
Tabel 18. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi & Arah Kebijakan Sekretariat DPRD DIY 42
Tabel 19. Program, Indikator program dan Keterangan Indikator Program 44
Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rencana Strategis Periode Tahun 2022-2027 58
Tabel 21. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD DIY 99
Tabel 22. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD DIY 99
Tabel 23. Dukungan Sekretariat DPRD DIY Terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 1
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD DIY… 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta disesuaikan dengan perubahan kondisi dan keadaan lingkungan Pemerintah Daerah yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun, sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Sekretariat DPRD DIY sesuai perkembangan lingkungan strategik. Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD DIY setiap tahun dalam periode renstra bersangkutan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara sederhana, hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

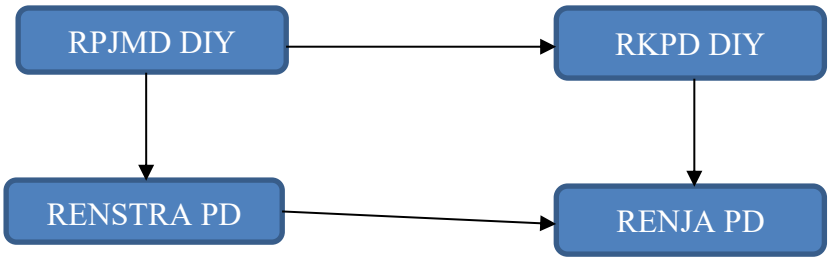

Penyusunan Renstra tidak terlepas dari tuntutan Reformasi yang merupakan kehendak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, adanya kesadaran rakyat akan perlunya suatu tata pemerintahan yang baik (*good Governance*). Adapun pemerintahan yang baik ditandai dengan profesionalisme, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai yang digariskan pada UUD 1945. Diperlukannya pemerintahan yang baik (*good Governance*) merupakan suatu tuntutan masyarakat agar tercipta kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civilsociety*, dan usahawan atau sektor swasta (*business*). Kondisi ini terwujud manakala masing-masing komponen dapat melakukan perannya sesuai ciri-ciri suatu pemerintahan yang baik.

Sebagai implementasi dan karakteristik pemerintahan yang demikian ini adalah diperlukan mekanisme agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah sebagai upaya menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke

masyarakat sesuai mandat politik yang diberikan rakyat melalui perundang-undangan, baik pada level nasional maupun daerah.

Paradigma pemerintahan yang sebelumnya berorientasi pada kekuasaan sekarang telah mengalami perubahan dengan berorientasi pada keinginan dan kepentingan rakyat. Konsekuensi dari paradigma ini adalah ditempatkannya rakyat pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan.

Selaras dengan hal tersebut di atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, sehingga status keistimewaan Yogyakarta diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih utuh. Bila hal tersebut dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana provinsi sebagai daerah otonom mempunyai beberapa kewenangan diantaranya kewenangan perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah yang mantap dan berkesinambungan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan regional.

Sesuai dengan arahan penyusunan RPJMD Pemerintah Daerah DIY dan prediksi perkembangan politik dan demokrasi yang berkembang cukup pesat serta tahun politik pada tahun 2023-2024, yaitu adanya perhelatan akbar nasional dengan digelarnya Pemilihan Umum maka Sekretariat DPRD DIY merupakan OPD strategis sesuai perannya dalam mendukung program dan indikator RPJMD Pemerintah Daerah DIY. Selain itu, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD DIY akan melaksanakan pembangunan fisik gedung baru DPRD DIY yang direncanakan dibangun dalam kurun waktu 3 tahun sampai dengan tahun 2026 (*multiyears*). DPRD DIY membutuhkan gedung baru dikarenakan beberapa sebab antara lain gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro yang saat ini digunakan merupakan bangunan *heritage* atau warisan cagar budaya yang tidak dapat diubah bentuknya kecuali hanya pemeliharaan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri karena DPRD DIY membutuhkan tambahan ruang bagi fraksi-fraksi maupun ruang rapat AKD(Alat Kelengkapan Dewan) yang belum terpenuhi, namun dengan statusnya sebagai bangunan *heritage*, pembangunan tidak dapat dilakukan. Disisi lain, lokasi gedung yang berada di Jalan Malioboro menjadi pusat perbelanjaan dari sisi keamanan kurang memadahi dan Jalan Malioboro kedepan akan dijadikan pedestrian sehingga akses keluar masuk gedung DPRD DIY akan terhambat.

Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 mengalami perubahan sebagai tindak lanjut dari adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penyelarasan Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022-2027 dan sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2027, maka Sekretariat DPRD DIY melakukan perubahan dokumen Renstra Tahun 2022-2027 untuk menyesuaikan target kinerja sesuai dengan hasil penyelarasan yang telah dilakukan.

Adapun tugas yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY harus mengacu tujuan Pemerintah Daerah DIY yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintah yang berbasis *Good Governance* dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik.

DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, antara lain hak administrasi dan keuangan dalam rangka menunjang kesejahteraan DPRD, kewajiban melakukan penyerapan aspirasi berupa reses dan memperjuangkan hak-hak rakyat sebagai representasi wakil rakyat, serta melaksanakan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY.

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi program dan kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD DIY agar sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Pemerintah Daerah DIY.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Renstra sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD DIY, landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penyelarasan Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022-2027;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan Sekretariat DPRD DIY untuk 5 (lima) tahun (periode 2022-2027) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD DIY adalah:

a) Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode 2022-2027.
b) Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY setiap tahun selama periode Renstra.
c) Menjadi tolok ukur dalam pengukuran capain kinerja Sekretariat DPRD DIY.
d) Menjamin terlaksananya program dan kegiatan dapat dilakukan secara berjenjang, bertahap dan terstruktur.
e) Menyesuaikan target kinerja sesuai amanat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2026 Tentang Penyelarasan Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022-2027.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD DIY adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD DIY adalah unsur *supporting* kepada DPRD DIY yang dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD DIY. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY

Tugas	:	membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi	:	1. penyusunan program kerja Sekretariat DPRD; 2. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD, dan DPRD; 3. penyiapan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 4. penyelenggaraan persidangan dan penyiapan bahan risalah rapat DPRD; 5. fasilitasi alat kelengkapan DPRD; 6. fasilitasi penetapan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur; 7. fasilitasi pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, produk hukum DPRD, pengkajian dan produk hukum Sekretariat DPRD; 8. pelaksanaan keprotokolan, hubungan masyarakat, pelayanan aspirasi masyarakat; 9. fasilitasi budaya pemerintahan Sekretariat DPRD; 10. pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; 11. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; 12. pembinaan reformasi birokrasi Sekretariat DPRD; 13. penyusunan kebijakan proses bisnis Sekretariat DPRD;

		14. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Sekretariat DPRD; 15. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan 16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Adapun struktur organisasi Sekretariat DPRD DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian dan Sub Bagian, terdiri dari:
   a) Bagian Umum, terdiri dari 2 Subbagian yaitu :
      1) Subbagian Tata Usaha
      2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
   b) Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian;
   c) Bagian Persidangan;
   d) Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, terdiri dari 1 Subbagian yaitu:
      1) Subbagian Keuangan
   e) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari 1 Subbagian yaitu:
      1) Subbagian Protokol Dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 secara bagan dapat disampaikan dalam Gambar 1 berikut:

Gambar 2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD DIY

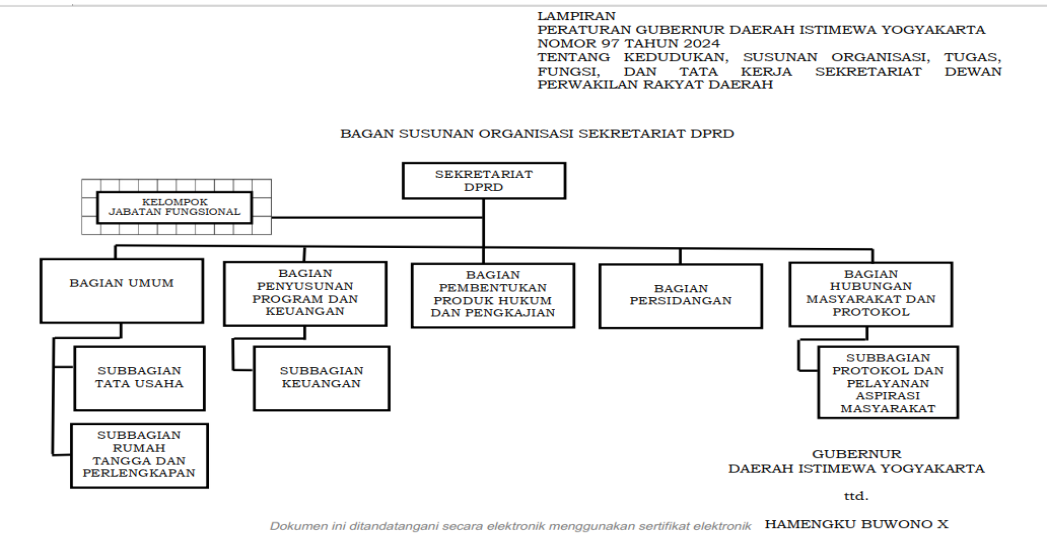

Secara kelembagaan, DPRD DIY masa jabatan periode 2019-2024 terdiri dari 55 orang Anggota DPRD (10 anggota perempuan dan 45 anggota laki-laki) yang merupakan utusan dari 10 Partai politik yang tergabung dalam 7 Fraksi, 4 komisi, dan 4 Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut membutuhkan ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi dan penunjang lainnya. Di sisi lain, gedung DPRD DIY yang terletak di Jalan Malioboro No 54 Yogyakarta belum dapat memenuhi kebutuhan ruang tersebut secara ideal sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, Gedung DPRD DIY saat ini tidak dapat dikembangkan atau direhabilitasi karena terletak di lokasi wisata yang rencana kedepan akan dijadikan kawasan pedestrian. Selain itu, sebagian Gedung DPRD DIY yang digunakan saat ini merupakan bangunan *heritage* dan tidak dapat diubah atau direhabilitasi yang secara struktur dan arsitekturnya harus dipertahankan dalam bentuk aslinya, sehingga DPRD DIY memerlukan gedung di lokasi baru untuk memenuhi kebutuhan ruang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Renstra Sekretariat DPRD DIY 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan yang mengakomodir program dan kegiatan pasca penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk masa jabatan 2022-2027. Dalam Renstra Sekretariat DPRD DIY 2022-2027 terdapat satu kegiatan yang menjadi pokok selain dukungan tugas dan fungsi DPRD, sesuai informasi diatas yaitu pengadaan gedung baru DPRD DIY dimana pengadaan gedung tersebut harus melalui beberapa tahapan proses mulai dari *basic design* yang telah dilaksanakan oleh PUESDM DIY pada tahun 2020, Penyusunan DED yang telah masuk perencanaan Tahun 2022 dan tahapan selanjutnya adalah Proses pengurusan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung termasuk dokumen lingkungan dan tahapan pelaksanaan pembangunan fisik gedung serta interior dan mebelairnya. Pembangunan gedung baru DPRD DIY diharapkan pada tahun 2024 dapat dimulai pembangunan fisik gedung DPRD DIY dimaksud dan direncanakan selesai pada tahun 2026.

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD DIY dapat diuraikan berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Golongan	Jumlah Pegawai	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S2	IV	6	4 laki-laki dan 2 perempuan
2	S1	IV	-	-
3	S2	III	6	4 perempuan dan 2 laki-laki
4	S1	III	21	10 Perempuan dan 11 Laki-laki
5	Diploma IV	III	1	Laki-laki
6	SLTA (Sederajat)	III	4	1 Perempuan dan 3 Laki-laki
7	Diploma III	II	7	3 Laki-laki dan 4 Perempuan
8	SLTA (Sederajat)	II	1	Laki-laki
9	S1	IX	10	2 Laki-laki dan 8 Perempuan
10	Diploma III	VII	7	1 Laki-Laki dan 6 Perempuan
11	SLTA (Sederajat)	V	5	5 Laki-laki
Jumlah			68	

Sumber Data: *Sekretariat DPRD DIY (2026)*

Diberlakukannya moratorium penerimaan ASN oleh Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara merupakan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap kinerja DPRD DIY. Pemberlakuan moratorium tersebut kedepan akan bergeser kearah *zero growth* bahkan *minus growth* yang mana akan terjadi pegurangan jumlah ASN pada Sekretariat DPRD dan dapat berdampak pada fungsi pelayanan kinerja DPRD DIY.

Berdasarkan ketersediaan formasi jabatan SDM Sekretariat DPRD DIY menurut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2026 tentang Formasi Jabatan Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY sejumlah 130 orang untuk total formasi di Sekretariat DPRD DIY. Namun realitanya sampai dengan bulan Mei 2026 jumlah ASN di Sekretariat DPRD DIY hanya 68 orang yang terdiri dari structural, pejabat fungsional, fungsional dan pelaksana serta terus mengalami penurunan karena pensiun/purna tugas. Komposisi Jabatan Struktural sebanyak 10 pegawai dapat dijabarkan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan Jabatan Struktural

No	Jenis Eselon	Jumlah	Keterangan
1	II	1	Sekretaris
2	III	5	Kepala Bagian
3	IV	4	Kepala Subbagian
Jumlah		10	

Sumber Data: Pergub DIY Nomor 97 Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD telah mengubah jumlah subbagian di Sekretariat DPRD DIY dari 15 subbagian menjadi 4 subbagian. Hal ini sejalan dengan Permenpan RB nomor 25 tahun 2021 terkait penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan ketersediaan SDM Sekretariat DPRD DIY tersebut maka hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pengkaderan pegawai yang memenuhi syarat secara kepangkatan, serta memiliki kemampuan *leadership*, sehingga upaya penambahan pegawai sebagai pengganti karena pensiun dan karena menduduki jabatan baru/mutasi untuk mendapat penambahan pegawai sesuai kebutuhan pada bidang dan kompetensinya dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Sesuai dengan ketugasan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD DIY terkait tugas fasilitasi dan dukungan administrasi pada DPRD DIY terbagi pada 5 (lima) Bagian, adapun komposisi pegawai setiap bagian bisa disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan ketugasan

NO	STRUKTUR	Golongan							Keterangan
		I	II	III	IV	IX	VII	V	
1	Sekretaris				1				
2	Bagian Umum	0	5	6	1			3	
3	Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	0	0	8	2	4			
4	Bagian Persidangan	0	1	5	0	1	4		
5	Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	0	2	4	2	1			
6	Bagian Humas dan Protokol	0	0	7	1	3	2	2	
Jumlah		0	8	30	7	9	6	5	

Sumber Data : *Sekretariat DPRD DIY (2026)*

Kesenjangan jumlah pegawai dan kebutuhan ideal dengan adanya pengurangan pegawai karena purna tugas atau pensiun di Sekretariat DPRD DIY sejak beberapa tahun yang lalu atas persetujuan Pemerintah Daerah melakukan penambahan pegawai melalui Outsourcing dan adanya penerimaan serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di tahun 2023 dan 2025, namun demikian terbatas penambahan pegawai tertentu, sedangkan pada kompetensi khusus yang dibutuhkan saat ini yaitu Tenaga

Fungsional lainnya masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal. Berikut disajikan ketersediaan Outsourcing di Sekretariat DPRD DIY:

Tabel 5. Komposisi Outsourcing Sekretariat DPRD berdasarkan ketugasan

No	Bagian	Jumlah Pegawai Outsourcing
1	Kearsipan	8
2	E-Library	2
3	Staff Fraksi	43
4	Pengelola Berita	7
5	Keamanan	28
6	Cleaning Service	12
7	Taman	3
8	Pengemudi	6
9	Ajudan Pimpinan	5
10	Pramuladi	3
	Jumlah	**117**

Sumber: Sekretariat DPRD DIY (2026)

Berikut disajikan tabel 6 tentang kebutuhan pegawai dan kualifikasi jabatan pegawai di Sekretariat DPRD DIY.

Tabel 6. Kebutuhan Pegawai sesuai Kualifikasi Jabatan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2026

		NAMA JABATAN	JUMLAH		KESESUAIAN DENGAN KUALIFIKASI JABATAN		KET
			FORMASI	BEZEETING	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1		2	8	9	10	11	12
A		**JABATAN PIMPINAN TINGGI**					
	1	SEKRETARIS DPRD	1	1	1	0	
B		**JABATAN FUNGSIONAL**					
	1	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	1	
	2	Arsiparis Terampil	1	2	1	1	lebih 1
	3	Asisten Perisalah Legislatif Penyelia	2	0	0	2	
	4	Asisten Perisalah Legislatif Mahir	3	0	0	3	

	5	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	4	4	4	0	
	6	Asisten Perpustakaan Terampil	1	0	0	1	
	7	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	2	0	0	2	
	8	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	3	2	2	1	
	9	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	3	3	3	0	
	10	Perisalah Legislatif Madya	2	0	0	2	
	11	Perisalah Legislatif Muda	3	0	0	3	
	12	Perisalah Legislatif Pertama	4	1	1	3	
	13	Perencana Ahli Madya	1	0	0	1	
	14	Perencana Ahli Muda	1	1	1	0	
	15	Perencana Ahli Pertama	2	1	1	1	
	16	Penata Laksana Barang Penyelia	1	0	0	1	
	17	Penata Laksana Barang Mahir	1	0	0	1	
	18	Penata Laksana Barang Terampil	1	1	1	0	
C		**JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)**					
	1	Kepala Bagian Umum	1	1	1	0	
	2	Kepala Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Pengkajian	1	1	1	0	
	3	Kepala Bagian Persidangan	1	1	1	0	
	4	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1	1	1	0	

	5	Kepala Bagian Humas dan Protokol	1	0	0	1	
D		**JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)**					
	1	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	1	0	
	2	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	1	1	1	0	
	3	Kepala Subbagian Keuangan	1	1	1	0	
	4	Kepala Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat	1	1	1	0	
E		**PELAKSANA**					
I		**BAGIAN UMUM**					
	1	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1	1	
	2	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	1	
1.1.		**SUBBAGIAN TATA USAHA**					
	3	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	1	0	
	4	Pengolah Data dan Informasi	3	1	1	2	
	5	Pengadministrasi Perkantoran	3	1	1	0	
1.2.		**SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN**					
	6	Penelaah Teknis Kebijakan	4	0	0	4	
	7	Operator Layanan Operasional (5)	4	2	2	2	
	8	Pengolah Data dan Informasi	3	3	3	0	
	9	Pengadminisrrasi Perkantoran	3	3	3	0	
2		**BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**					
	10	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	1	1	
	11	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	1	0	

	12	Penata Layanan Operasional 7)	2	2	2	0	
2.1		**SUBBAGIAN KEUANGAN**					
	13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	0	1	
	14	Pengolah Data dan Informasi	7	2	2	5	
3		**BAGIAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAN PENGKAJIAN**					
	15	Penelaah Teknis Kebijakan	5	1	1	4	
	16	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	3	3	3	0	
	17	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	1	1	1	0	
	18	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	1	
	19	Penata Layanan Operasional 7)	4	4	4	0	
4		**BAGIAN PERSIDANGAN**					
	20	Penelaah Teknis Kebijakan	17	5	5	12	
	21	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	0	1	
5		**BAGIAN HUMAS DAN PROROKOL**					
	22	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	2	0	
	23	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	2	1	1	1	

	24	Pengolah Data dan Informasi	1	0	0	1	
	25	Pengadministrasi Perkantoran	3	3	3	0	
	26	Penata Layanan Operasional 7)	1	1	1	0	
	27	Penata Layanan Operasional (6)	1	1	1	0	
5.1.		**SUBBAGIAN PROTOKOL DAN PELAYANAN ASPIRASI MASYARAKAT**					
	28	Penata Keprotokolan	3	2	2	1	
	29	Penata Layanan Operasional	2	2	2	0	
		JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN	**130**	**68**	**67**	**63**	lebih 1

Sumber: Sekretariat DPRD DIY (2026)

Terkait dengan kebutuhan pembangunan gedung baru DPRD DIY, Sekretariat DPRD DIY telah berkonsultasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Dinas terkait berdasarkan Telaah Staf Nomor 120/06700 Tanggal 14 November 2019 tentang rencana pembangunan gedung baru DPRD DIY yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah DIY. Dalam telaah tersebut disampaikan bahwa seiring dinamika serta perkembangan kawasan dari sisi luasan, aksesibilitas, dan kebutuhan ruang kerja, Gedung DPRD DIY yang berlokasi di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta sudah tidak memadai untuk menampung seluruh aktivitas kedewanan.

Kemudian terdapat kajian Tenaga Ahli Sekretariat DPRD DIY terkait masterplan rencana rehabilitasi Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro yang menyebutkan bahwa rehabilitasi tidak bisa dilakukan karena gedung tersebut merupakan bangunan *heritage* sehingga muncul wacana pembangunan Gedung DPRD DIY di luar kawasan Malioboro. Disamping hal tersebut, terdapat Kajian Kawasan Gedung Pemerintah oleh Dinas PUP dan ESDM DIY yang didalamnya memuat rancangan Gedung DPRD DIY baru di Kawasan Jalan Kenari Yogyakarta.

Selanjutnya pada akhir tahun 2021 terbit surat Sekretaris Daerah DIY nomor 011/24791 tanggal 29 Desember 2021 perihal Pembangunan Gedung DPRD DIY yang mengamanahkan agar rencana pembangunan gedung dimuat dalam RPJMD DIY dan Renstra Sekretariat DPRD DIY serta dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY. Oleh karena itu, dalam

dokumen RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD DIY ditindaklanjuti dengan mencantumkan target dan anggaran sesuai kebutuhan untuk pembangunan gedung baru DPRD DIY. Pembangunan gedung ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan yang komprehensif.

Terkait dengan sarana dan prasarana selain gedung di Sekretariat DPRD DIY, terdapat pula kendaraan dinas dan peralatan yang menjadi bagian penunjang pelaksanaan fasilitasi kepada DPRD. Berikut disajikan ketersediaan kendaraan dinas dan peralatan yang menunjang pelaksanaan fasilitasi DPRD di Sekretariat DPRD DIY:

Tabel 7. Kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD DIY 2026

No.	Jenis Kendaraan Dinas	Jumlah	Merk/Type	Tahun Pembelian	Fungsi
1	Station Wagon	5	Toyota Avanza Veloz	3 unit Tahun 2017 2 unit Tahun 2018	Kendaraan Operasional Bagian
2	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	4	Toyota Hiace	2015	Kendaraan Operasional Komisi
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	Toyota/Kijang Innova G	2012	Kendaraan Operasional
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Toyota/New Avanza Veloz 1.5 M/T	2012	Kendaraan Operasional
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Toyota Kijang	2012	Kendaraan Operasional
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	TOYOTA KIJANG INNOVA V	2015	Kendaraan Operasional Sekretaris DPRD DIY
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Toyota / Innova Venturer 2.0 A/T	2022	Kendaraan Operasional
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Toyota / Kijang Innova 2.4 V A.T	2022	Kendaraan Operasional
9	Sepeda Motor	2	Honda NF 125 TRF	2008	Kendaraan Operasional
10	Sepeda Motor	1	Suzuki Shogun Axelo FL 125 SCD	2012	Kendaraan Operasional
11	Sepeda Motor	5	Honda AFX12U21C08 M/T	3 unit Tahun 2016 2 unit Tahun 2018	Kendaraan Operasional

Sumber: https://asetdiy.jogjaprov.go.id/2026 (diakses 29 Juni 2026)

Beberapa kendaraan dinas operasional di Sekretariat DPRD DIY saat ini memiliki kondisi yang perlu perhatian tersendiri dan kendaraan roda empat yang sudah memiliki jarak tempuh yang cukup tinggi sehingga memerlukan perawatan yang lebih maksimal. Hal ini berpengaruh pada kelancaran operasional Sekretariat DPRD DIY.

Tabel 8. Sarana Prasarana Peralatan di Sekretariat DPRD DIY 2026

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Fasilitas Sekretariat DPRD DIY	Fasilitas DPRD DIY
1	P.C Unit	84 unit	66 Unit	7 Unit di Ruang Fraksi 6 Unit di Ruang Pimpinan DPRD DIY 5 Unit di Ruang Komisi
2	Lap Top	16 unit	16 unit	
3	Note Book	31 Unit	27 Unit	1 Unit Ruang Wakil Ketua 3 Unit Ruang Komisi
4	Tablet PC	66 Unit	11 Unit	55 Unit
5	Printer	60 Unit	44 Unit	7 Unit Ruang Fraksi 2 Unit Ruang Pimpinan DPRD DIY 7 Unit Ruang Komisi
6	Scanner	3 Unit	3 Unit	

Sumber: *https://asetdiy.jogjaprov.go.id/2026/* (diakses tanggal 29 Juni 2026)

Total ketersediaan P.C Unit, Laptop, dan Note Book lainnya tidak mencukupi untuk memfasilitasi SDM di Sekretariat DPRD DIY dalam rangka menunjang kinerja DPRD DIY dimana sebaiknya setiap SDM memiliki fasilitas P.C Unit dan Printer Sendiri sehingga tidak perlu antri untuk mengerjakan setiap pekerjaan. Selain itu, printer dan scanner di Sekretariat DPRD DIY juga tidak semuanya dalam kondisi prima walaupun sudah dilaksanakan pemeliharaan, sehingga sedikit banyak mempengaruhi kinerja karyawan Sekretariat DPRD DIY.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY

Adapun kinerja Sekretariat DPRD DIY dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD DIY selama tahun anggaran 2022 bisa disampaikan dengan memperhatikan laporan kinerja pemerintah atau LKjIP Sekretariat DPRD DIY dengan penjelasan pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja				Realisasi Anggaran			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	95	97.94	55.75	66.21	61,488,022,456	64.021.823.087	62.326.103.483	176.473.149.183
2	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	70.21	89.06	84.28	82.83	49,809,113,430	59.387.176.335	54.868.470.174	52.008.004.743

Sumber Data : Sekretariat DPRD DIY (2026)

Dari Tabel 9 di atas, secara makro dapat dilihat bahwa kinerja fisik dan keuangan di Sekretariat DPRD DIY berjalan dengan baik. Seluruh target fisik yang direncanakan dalam Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2025 dapat tercapai, bahkan terlampaui. Sementara untuk target keuangan, pagu anggaran tahun renstra secara eksisting lebih rendah dibandingkan pagu anggaran indikatif dalam Renstra. Hal ini menunjukkan terdapat dinamika dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pada Sekretariat DPRD DIY. Hal ini perlu dipahami, bahwa kedudukan Sekretariat DPRD DIY adalah sebagai unsur *supporting* kepada DPRD DIY serta dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD DIY. Renstra menjadi domain Pemerintah Daerah melalui OPD-nya (termasuk Sekretariat DPRD DIY), sementara proses perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pemerintah daerah harus memperhatikan peran legislatif (fungsi penganggaran dan pengawasan).

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD DIY sangat bergantung pada kinerja DPRD DIY, hal ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD DIY banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri dibandingkan dengan institusi pelayanan OPD lainnya di lingkungan Pemda DIY. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya 4 orang Pimpinan DPRD namun juga pada 51 Anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam Alat Kelengkapan DPRD, namun sifat fasilitasinya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat tergantung hasil keputusan kolektif sesuai mekanisme yang diatur dalam tatib DPRD.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh *stakeholder* yang berkepentingan dengan Anggota DPRD sebagai Wakil Rakyat sekaligus representasi dari Partai Politik di DIY yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada para wakil rakyat.

Sebagai perbandingan, dalam Bab ini disajikan data hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY yang telah dilaksanakan pada periode Renstra sebelumnya yaitu tahun 2017 - 2022 yang meliputi evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY pada Renstra Tahun 2017 - 2022 serta evaluasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD DIY pada Renstra Tahun 2017 - 2022.

Adapun rincian hasil evaluasi terhadap rencana dan realisasi capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD selengkapnya dapat disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10 di halaman selanjutnya.

Tabel 10. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD DIY Pada Renstra Tahun 2017 - 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu				95,5	96	96	n/a	n/a	97,5	105,65	130,76	n/a	n/a	96,5	100,82	113,38	n/a	n/a
2.	Persentase bahan acara yang terselesaikan sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY				n/a	n/a	n/a	96.5	96.5	n/a	n/a	n/a	144,44	n/a	n/a	n/a	n/a	120,47	96,5
3.	Persentase produk hukum daerah dan DPRD yang dibahas tepat waktu				n/a	n/a	n/a	98	98	n/a	n/a	n/a	119,48	n/a	n/a	n/a	n/a	108,74	98
4.	Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesabilitas informasi publik dan keprotokoleran				75	80	85	85	90	79,45	90,72	85,92	87,9	n/a	77,22	85,36	85,46	86,45	90
5.	Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan				n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Data: Sekretariat DPRD DIY (2022)

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY pada Renstra tahun 2017 - 2022 di atas, dapat kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY tidak terdapat kesenjangan/gap yang berarti. Hal ini bermakna bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD DIY untuk antar kegiatan sudah terlaksana dengan baik meskipun masih diperlukan perbaikan-perbaikan baik dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Untuk indikator 1 (satu) hanya sampai dengan tahun ketiga karena pada tahun keempat atau tahun 2021 terdapat penyesuaian terkait dengan adanya Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Pada tahun keempat dan kelima indikator program utama menggunakan dua indikator, yaitu Persentase bahan acara yang terselesaikan dengan fasilitasi Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY dan Persentase produk hukum daerah dan DPRD yang dibahas tepat waktu. Dua indikator tersebut merupapan hasil dari penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Pelayanan-pelayanan yang telah memenuhi target diantaranya adalah fasilitasi terhadap agenda DPRD meliputi penyusunan raperda inisiatif dan pembahasan peraturan daerah oleh DPRD, peningkatan wawasan DPRD DIY pada tahun 2018, dokumentasi kegiatan dan kebijakan DPRD pada tahun 2019, kajian/makalah/Research Brief yang dimanfaatkan oleh Anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi dewan, Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat pada tahun 2019, dan Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD pada tahun 2019.

Terkait dengan jumlah produk hukum yang telah dihasilkan di DPRD DIY dalam kurun waktu Renstra 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan

No	Uraian	Jumlah Produk Hukum						
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Propemperda	14 prioritas; 3 kumulatif terbuka	9 prioritas; 3 kumulatif terbuka	8 prioritas; 3 kumulatif terbuka	10 prioritas; 3 kumulatif terbuka	9 prioritas; 3 kumulatif terbuka	13 prioritas; 3 kumulatif terbuka	13 prioritas; 3 kumulatif terbuka
2	Raperda yang disetujui DPRD dan disahkan menjadi Perda (termasuk kumulatif terbuka)	13	14	5	14	12	9 prioritas 3 kumulatif (3 perda prioritas diselesaikan di 2025 dan 1 perda prioritas tidak di realisasi karena tdk mendapat persetujuan Bersama)	6 prioritas 3 kumulatif
3	Raperda Inisiatif DPRD	5	5	5	4	5	8	8

Sumber: Sekretariat DPRD DIY (2026)

Tabel di atas menyajikan perkembangan perencanaan dan realisasi produk hukum di DPRD DIY selama periode tujuh tahun (2019–2025). Pada kategori program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), target tahunan secara konsisten menetapkan kombinasi antara program prioritas dan kumulatif terbuka. Angka target prioritas tertinggi berada di tahun 2019 dengan 14 prioritas, kemudian cenderung stabil di kisaran 8–10 prioritas pada tahun-tahun berikutnya, sebelum kembali meningkat menjadi 13 prioritas pada tahun 2024 dan 2025.

Dari sisi realisasi, jumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berhasil disetujui dan disahkan menjadi Perda (termasuk kumulatif terbuka) menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Kinerja tertinggi tercatat pada tahun 2020 dan 2022 dengan masing-masing 14 Perda disahkan, serta tahun 2019 sebanyak 13 Perda. Namun, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 yang hanya mengesahkan 5 Perda. Pada akhir periode (2024–2025), tabel mencatat catatan khusus keterlambatan, di mana beberapa perda prioritas baru diselesaikan di tahun berikutnya atau bahkan tidak terealisasi karena tidak mendapat persetujuan bersama.

Sementara itu, untuk kontribusi legislatif berupa Raperda Inisiatif DPRD, trennya relatif stabil dan menunjukkan peningkatan di akhir periode. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023, jumlah raperda inisiatif bergerak stagnan di angka 4 hingga 5 raperda per tahun. Kinerja inisiatif ini baru menunjukkan lonjakan positif yang cukup berarti pada tahun 2024 dan 2025, di mana masing-masing berhasil menghasilkan sebanyak 8 Raperda Inisiatif.

Keberhasilan pencapaian target pelaksanaan tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan secara umum adalah ketersediaan anggaran dan ketepatan jadwal agenda DPRD, ketersediaan RKT, SDM, agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan melalui rapat Badan Musyawarah DPRD DIY, dewan aktif dalam mengikuti kegiatan bimtek, serta koordinasi dengan alat kelengkapan dewan meningkat. Diantara faktor pendorong yang paling berpengaruh untuk tiap-tiap kegiatan adalah faktor sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY.

Tabel 12. Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY pada Renstra Tahun 2017 - 2022

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	51.860	58.803	39.307	n/a	n/a	38.312	35.954	28.263	n/a	n/a	70	54	69	n/a	n/a	-10	-14
Persentase bahan acara yang terselesaikan sesuai dengan agenda program kerja DPRD DIY	n/a	n/a	n/a	7.811	9.808	n/a	n/a	n/a	1.651	n/a	n/a	n/a	n/a	60	n/a	26	n/a
Persentase produk hukum daerah dan DPRD yang dibahas tepat waktu	n/a	n/a	n/a	18.175	13.093	n/a	n/a	n/a	11.802	n/a	n/a	n/a	n/a	70	n/a	-28	n/a
Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesabilitas informasi publik dan keprotokoleran	20.533	20.854	15.889	36.972	41.088	17.604	16.555	12.641	21.939	n/a	86	79	80	76	n/a	30	15
Terwujudnya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	n/a	n/a	n/a	n/a	2.102	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber Data : Sekretariat DPRD DIY (2022)

Berdasarkan tabel 12, Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY pada Renstra Tahun 2017 - 2022 dapat diketahui bahwa program-program pelayanan Sekretariat DPRD DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya telah dijalankan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio-rasio yang dihasilkan menunjukkan prosentase mendekati nilai 100% dan hanya terdapat satu indikator yaitu Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan rasio dibawah 70%, yaitu sebesar 54% dan 69%. Faktor yang mempengaruhi rendahnya rasio indikator ini adalah adanya sisa adcost perjalanan dinas yang diakibatkan oleh pembatasan perjalanan sebagai dampak dari masih adanya pandemi Covid-19.

Untuk indikator program yang memiliki rasio terbesar adalah Persentase layanan aspirasi masyarakat, aksesabilitas informasi publik dan keprotokoleran yaitu sebesar 86% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan pelaksanaan program telah terealisasi dengan baik. Sedangkan rasio untuk indikator program yang lain sesuai dengan Tabel 10 dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dengan nilai rasio yang mendekati 100%. Nilai rasio dapat menunjukkan baik atau kurang baiknya pelaksanaan suatu program apabila mendekati nilai 100% atau sebesar 100% yang menandakan bahwa target telah terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya, faktor-faktor yang juga memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pelayanan oleh Sekretariat DPRD DIY ialah prosedur/mekanisme kinerja pengelolaan pendanaan untuk masing-masing kegiatan yang masih harus ditingkatkan kembali dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan untuk masing-masing program dan kegiatan. Selain itu, faktor sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang kurang memadahi dikarenakan pemberlakuan moratorium terhadap Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2015 menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pelayanan kepada DPRD.

Dari sisi capaian target kinerja Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2017-2022 pada kondisi capaian sampai dengan Tahun 2021 juga sangat baik, bahkan melampaui target kinerja fisik dan keuangan dalam evaluasi Renstra Tahun 2021. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Sekretaris DPRD DIY, sasaran strategis Sekretariat DPRD DIY pada tahun 2021 adalah: 1) Meningkatnya kualitas informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD; dan 2) Terfasilitasinya kinerja DPRD.

Terkait dengan ketugasan keistimewaan oleh Sekretariat DPRD DIY, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan DIY pada renstra tahun 2017-2022 terdapat program kegiatan Dana Keistimewaan terkait proses penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

Sekretariat DPRD DIY terus berusaha melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas kinerja dalam pengelolaan pendanaan pelayanan agar tercapai target-target kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang direncanakan. Salah satu upaya untuk dapat mengatasi permasalahan berkenaan dengan sumber daya manusia adalah penerimaan pegawai non PNS maupun pegawai outshourcing baik melalui Badan Kepegawaian Daerah maupun melalui pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelayanan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD DIY dapat terlaksana dengan baik dan mampu untuk terus menunjukkan progress pelaksanaan program sesuai dengan target kinerja dan RPJMD DIY.

2.4. Tantangan dan Peluang serta Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD DIY

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Dalam subbab ini akan dibahas terkait peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada DPRD DIY, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD DIY serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi /aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik *(good governance)* antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi eksternal organisasi Sekretariat DPRD DIY yang terdiri atas peluang dan tantangan selama beberapa waktu kedepan sebagai berikut:

1. **Peluang *(Opportunities)***
   a. dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD DIY;
   b. tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD DIY sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan;

c. terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;
d. terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik;
e. usaha Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public.

2. Tantangan/ancaman/hambatan *(Threats)*

a. cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
b. Lokasi kantor DPRD yang terletak di kawasan Malioboro dijadikan kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Kemungkinan adanya penambahan anggota DPRD DIY pada pemilu 2024 dan berlangsungnya tahun 2023 sebagai tahun politik menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024 akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD DIY.

Dalam penerapan kebijakan tetap dilaksanakan dalam koridor tata pemerintahan yang baik *(good governance),* dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta mengeliminir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD DIY dengan dukungan APBD DIY Tahun Anggaran 2022-2027 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah.

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD DIY

Adanya *Zero Growth* dan Moratorium CPNS dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara akan memberikan dampak cukup signifikan terhadap kinerja Sekretariat DPRD DIY jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadahi. Realitas cepatnya perubahan peraturan-peraturan Pemerintah dan Kedudukan Sekretariat DPRD DIY akan mempengaruhi kualitas fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan kualitas fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD, disamping itu letak kantor DPRD dan Sekretariat DPRD DIY berada di Malioboro yang termasuk daerah terbuka dan rawan dari sisi keamanan. Adapun permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dan menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah:

1. Kualifikasi SDM tidak merata baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai dampak adanya *zero growth* dalam beberapa tahun ke depan pada penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang akan menyebabkan berkurangnya kualitas kinerja lembaga pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Sekretariat DPRD DIY. Adapun terkait sumber daya manusia, peluang yang bisa didapat karena pengurangan pegawai baik karena purna tugas atau pensiun adalah penambahan pegawai melalui Outsourcing, namun penambahan tersebut masih terbatas pada pegawai tertentu, sedangkan pada kompetensi khusus yang dibutuhkan saat ini yaitu Tenaga Fungsional masih menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap DPRD DIY akan ditingkatkan secara optimal.
2. Penyelesaian dukungan kinerja Sekretariat DPRD yang belum optimal sebagai akibat dari menurunnya jumlah kuantitas maupun kualitas sarana prasarana kendaraan dinas yang mana usia rata-rata kendaraan dinas di Sekretariat DPRD sudah diatas 10 tahun sehingga sering membutuhkan pergantian suku cadang dan pemeliharaan.
3. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat belum dapat mencakup keseluruhan lapisan masyarakat, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang di fasilitasi Sekretariat DPRD belum terintegrasi dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dewan.
4. Peran ganda yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD DIY membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan dalam hal komunikasi, negosiasi dan membaca situasi, yang mana tetap memperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak. Oleh karena itu diperlukan dukungan peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD DIY.

5. Dinamika politik yang berkembang di Lembaga DPRD mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan yang ditetapkan, sehingga alokasi waktu pembahasan bahan acara seringkali berubah-ubah.
6. Keadaan Gedung DPRD saat ini sudah tidak memadahi dan kurang representatif dengan kapasitas ruang rapat yang kurang serta adanya rencana pedestrian Jalan Malioboro akan menutup akses jalan bagi Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD untuk masuk ke kantor, karena satu-satunya jalan masuk Gedung DPRD adalah melalui Jalan Malioboro. Di sisi lain gedung DPRD DIY yang digunakan saat ini merupakan bagian dari gedung cagar budaya, atau *heritage* yang mana tidak dapat direhabilitasi sehingga apabila membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi ruang di DPRD tidak dapat terpenuhi.
7. Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat yang begitu cepat menyebabkan daerah harus menyesuaikan seluruh peraturan daerah yang terkait dengan kebijakan pusat, sehingga fasilitasi kepada DPRD khususnya fungsi pembentukan produk hukum bersama eksekutif harus dapat menyesuaikan perubahan pusat sesuai dengan kebutuhan daerah.

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. Visi dan Misi

Adapun RPJMD 2022 – 2027 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki visi "***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi***". Ukuran keterwujudan PANCAMULIA dapat diukur dengan beberapa ukuran sebagai berikut:

a. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan.
b. Kualitas Sumber Daya Manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan.
c. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.
d. Kehidupan ekonomi yang layak.
e. Mengecilnya ketimpangan sosial (antar kelas sosial, antar wilayah).
f. *Good Governance* pada berbagai tingkatan.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (*self-help*), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan *civil*

society yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. *Civil society* yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domain society secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara.

Rumusan PANCAMULIA dapat dilihat sebagai berikut:

1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupanpenghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban,
2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan ekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal,
3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama, baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi,
4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Pemerintah Daerah dapat diringkas dalam rumusan misi-misi pembangunan DIY tahun 2022-2027 sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;

2) Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat;

3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;

4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik.

B. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Adapun faktor penghambat yang berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD DIY bisa dipetakan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu Faktor Penghambat yang sangat berpengaruh pada kinerja Sekretariat DPRD adalah:

a. cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;

b. Lokasi kantor DPRD yang terletak di kawasan Malioboro dijadikan kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Kemungkinan adanya penambahan anggota DPRD DIY pada pemilu 2024 dan berlangsungnya tahun 2023 sebagai tahun politik menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024 akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD DIY.

Faktor-faktor penghambat dimaksud perlu mendapatkan prioritas penanganan dan perencanaan secara berkesinambungan serta penyelesaiannya melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, sebab bila permasalahan yang menjadi penghambat dimaksud tidak ditangani dan difasilitasi secara baik bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan atau penghambat terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sedangkan faktor pendorong yang bisa berpengaruh pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD DIY dari hasil pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD DIY hasil pemetaan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu:

a. dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD DIY;
b. tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi menyampaikan aspires dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD DIY sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan;
c. terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik;
d. usaha Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.

Faktor-faktor pendorong dimaksud perlu mendapatkan apresiasi atau keterbukaan kerjasama yang saling menguntungkan demi membantu penyelesaian permasalahan dan tantangan pelayanan terhadap DPRD DIY ke depan, bila hal tersebut bisa disikapi dan digunakan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bukan tidak mungkin optimalisasi pelayanan yang baik dalam fasilitasi dan

dukungan administrasi terhadap DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akan mempengaruhi keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Berdasarkan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD DIY dengan Kementerian/ Lembaga maupun Kabupaten/Kota tidak memiliki jalur hierarki yang mewajibkan semua urusan di Provinsi menjadi bagian urusan Pusat maupun semua urusan Kabupaten menjadi bagian urusan Provinsi dalam memfasilitasi DPRD secara Undang-Undang maupun Urusan. Berdasarkan hal tersebut maka Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 tidak menjabarkan telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maupun Telaahan Renstra Kabupaten/Kota.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 Sekretariat DPRD DIY melalui dokumen perencanaan Renstra 2022-2027 ini menganggarkan pembangunan fisik gedung baru DPRD DIY, yang sesuai arahan Gubernur DIY gedung tersebut akan dibangun di Jalan Kenari. Seperti diketahui dalam kajian RTRW oleh Dinas PU ESDM bahwa kawasan Jalan Kenari merupakan kawasan Pemerintahan dan memiliki lahan yang luas, sehingga dapat dijadikan gedung DPRD DIY baru sesuai dengan kebutuhan DPRD DIY. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 pada pasal 17 huruf e bahwa Sub BWP M Umbulharjo, meliputi: Blok M5 Muja-muju dan Blok M6 Semaki yang merupakan lahan calon Gedung baru DPRD DIY merupakan Zona Perkantoran.

Gedung DPRD DIY yang saat ini di Jalan Malioboro tidak dapat dimaksimalkan karena merupakan bangunan *heritage* atau cagar budaya sehingga tidak dapat dimaksimalkan sesuai kebutuhan ruang DPRD DIY. Terkait dengan kajian AMDAL dan ANDAL LALIN direncanakan selesai pada tahun 2023. Selanjutnya untuk penentuan standar luasan bangunan dan lahan serta ketentuan teknis lainnya, Sekretariat DPRD DIY berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dan mengacu serta mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung dan Permen PUPR RI Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi DPRD DIY oleh Sekretariat DPRD DIY didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya, meliputi:

a. Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD DIY melalui peningkatan pelayanan kepada DPRD DIY agar dapat menjaring aspirasi positif sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama di pedesaan.

b. Adanya penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD DIY untuk tetap konsisten dan maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada DPRD DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan SDM di Sekretariat DPRD DIY harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD DIY.

d. Keterbatasan kawasan perkantoran DPRD Jl. Malioboro Nomor 54 Yogyakarta dimana gedung DPRD DIY merupakan heritage dan rencana penerapan Pedestrian Malioboro menyebabkan terbatasnya akses dan mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kinerja menjadi kurang optimal sehingga membutuhkan Gedung baru di lokasi yang baru yang lebih representatif.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 97 Tahun 2024 tugas yang diampu Sekretariat DPRD DIY adalah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2022-2027 ialah **"Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal".**

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD DIY dalam mencapai tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD DIY, antara lain:

1. Terfasilitasinya kinerja DPRD;
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY.

Tabel 13. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

VISI Gubernur DIY 2022 – 2027 Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.					
MISI Gubernur DIY 2022 – 2027 Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi/TI.					
Tujuan RPJMD 2022-2027 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.					
Sasaran RPJMD 2022-2027 : Meningkatnya *Good Governance.*					
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD DIY					
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Meta Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**	**Meta Indikator Sasaran**
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD	Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah Agenda*) yang terselesaikan dibagi jumlah Agenda yang direncanakan x 100%
			Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Nilai Kategori Reformasi Birokrasi

*)*Agenda DPRD yang dimaksud ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan), hal tersebut termasuk jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili.*

Tabel 14. Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke - (%)					
				Base line	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	-	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	80	82	83	93	94	95
		Terfasilitasinya kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,5	95,5	96	97	100	100
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	A	A	A (82.00)	A (88.76)	A (89.74)	A (90.00)

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Visi, Misi, Tujuan, sasaran, strategi, dan arahan kebijakan Sekretariat DPRD DIY harus dapat menunjukkan relevansi dan konsistensinya dalam dokumen RPJMD periode 2022-2027. Sekretariat DPRD DIY sebagai OPD Pemerintah Daerah DIY yang dibentuk berdasarkan Perdais Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY berkewajiban untuk mendukung Tujuan, Sasaran, dan Program Pemerintah Daerah DIY.

Secara makro, dokumen RPJMD dijabarkan dalam sejumlah tujuan pemerintah daerah. Tujuan pemerintah daerah tersebut dijabarkan kembali pada sejumlah sasaran, yang dijabarkan lagi dalam sejumlah program pemerintah daerah tiap tahun. Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan program pemerintah daerah dalam RPJMD selanjutnya dipedomani oleh OPD dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD.

Tujuan Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung ketercapaian kualitas layanan kinerja dalam mencapai nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian sasaran Pemerintah Daerah DIY adalah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) A pada rentang tahun 2022-2027.

Berdasarkan tujuan, sasaran Pemerintah Daerah di atas, Sekretariat DPRD DIY menetapkan tujuan organisasi berupa, **"Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal"**, dengan sasaran berupa:

1. Terfasilitasinya kinerja DPRD, dengan indikator persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu;
2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY, dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY.

Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD DIY dengan memaksimalkan pencapaian sasaran dimaksud secara langsung akan mendukung agenda Reformasi Birokrasi (Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), dari sisi akuntabilitas anggaran melalui optimalisasi kerangka evaluasi instansi pemerintah yang berorientasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maupun akuntabilitas kegiatan melalui informasi aktifitas DPRD kepada masyarakat dan kualitas layanan kepada DPRD. Ke depan, perlu mulai didesain upaya menuju implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD DIY selama beberapa waktu kedepan dengan analisis internal dan eksternal sebagai berikut:

A. Analisis Internal

Analisis internal kondisi Sekretariat DPRD DIY dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pelaksanaan kegiatan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

1. **Kekuatan *(strengths)***
   a. eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga DPRD selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
   b. Tersedianya mekanisme kerja yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
   c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
2. **Kelemahan (*weaknesses*)**
   a. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
   b. kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan;

B. Analisis Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi dalam kurun waktu empat tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pelaksanaan kegiatan. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi Sekretariat DPRD DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

1. **Peluang *(Opportunities)***
   a. dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD DIY;
   b. tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi menyampaikan aspires dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD DIY sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan;
   c. terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik;
   d. usaha Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public.
2. **Tantangan/ancaman/hambatan *(Threats)***
   a. cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;

b. Lokasi kantor DPRD yang terletak di kawasan Malioboro dijadikan kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
c. Kemungkinan adanya penambahan anggota DPRD DIY pada pemilu 2024 dan berlangsungnya tahun 2023 sebagai tahun politik menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024 akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD DIY.

Analisis SWOT terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD DIY, dilakukan untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan faktor keberhasilan dan ancaman kegagalan. Bentuk matriks, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 15. Analisis SWOT

Faktor-Faktor Internal / Faktor-Faktor Eksternal	Kekuatan (*Strengths*/S) a. eksistensi lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga DPRD selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan; b. Tersedianya mekanisme kerja yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD; c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.	Kelemahan (*Weakness*/W) 1. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 2. kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan;
Peluang (*Opportunities*/O) 1. dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD; 2. tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik ke depan; 3. terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik; 4. usaha Pemerintah Daerah untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana public	Strategi S-O 1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga ahli. (S1, S2-O1); 2. Mendukung penguatan terhadap tiga fungsi DPRD (Anggaran, Pembentukan Perda, dan Pengawasan) (S1,S3-O2,O3) 3. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan (S1-O4)	Strategi W-O 1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD (W2-O1) 2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan (W1-O3, O4)
Tantangan/Ancaman (*Threats*/T) 1. cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat; 2. Lokasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terletak di kawasan Malioboro dan kedepan akan menjadi kawasan pedestrian menjadikan akses menuju kantor terhambat bahkan tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali dan disisi lain kebutuhan ruang rapat untuk DPRD saat ini tidak mencukupi sehingga DPRD DIY membutuhkan gedung baru untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 3. Kemungkinan adanya penambahan anggota DPRD DIY pada pemilu 2024 dan berlangsungnya tahun 2023 sebagai tahun politik menjelang Pemilihan Umum pada tahun 2024 akan meningkatkan tuntutan kepada pelayanan terhadap kinerja DPRD DIY;	Strategi S-T 1. Optimalkan peran Sekretariat DPRD DIY sebagai jembatan antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD DIY (S1, S2-O1,O2, O3) 2. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi (S1, S3-01)	Strategi W-T 1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya (W2-O1, O3) 2. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh (W1-O1, O2)

Berdasarkan analisis SWOT diatas terdapat beberapa alternatif strategi yang kemudian dikelompokkan dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi fokus dalam rangka mencapai tujuan Sekretariat DPRD DIY sebagai berikut:

Tabel 16. Rumusan Strategi

Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1. Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tenaga ahli. (S1, S2-O1); 2. Mendukung penguatan terhadap tiga fungsi DPRD (Anggaran, Pembentukan Perda, dan Pengawasan) (S1,S3-O2,O3) 3. Peningkatan Peran AKD DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan (S1-O4) 4. Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi (S1, S3-01)	Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
1. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelatihan dan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD (W2-O1) 2. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan (W1-O3, O4) 3. Optimalkan peran Sekretariat DPRD DIY sebagai jembatan antara legislatif dan eksekutif dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung DPRD DIY (S1, S2-O1,O2, O3) 4. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya (W2-O1, O3) 5. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh (W1-O1, O2)	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah

Asumsi dan konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis terhadap hubungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD DIY periode 2022-2027.

Selanjutnya, dalam rangka mengendalikan risiko-risiko strategis dan prioritas diperlukan manajemen risiko strategis berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Sekretariat DPRD DIY. Adapun daftar risiko strategis Sekretariat DPRD DIY dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 17. Daftar Risiko Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Isu Strategis	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
						Sebab	Risiko	Akibat		
1	Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	%							
2	Terfasilitasinya Kinerja DPRD	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	Masih tingginya angka kemiskinan di pedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD DIY melalui peningkatan pelayanan kepada DPRD DIY agar dapat menjaring aspirasi positif sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama di pedesaan.	Risiko Strategis / Pelayanan	Belum optimalnya sistem fasilitasi penjaringan aspirasi di area pedesaan yang angka kemiskinannya masih tinggi	Sekretariat DPRD kurang maksimal dalam memfasilitasi DPRD menjaring aspirasi spesifik pengentasan kemiskinan	Kesejahteraan masyarakat pedesaan lambat meningkat karena program tidak tepat sasaran	Karena fasilitasi penjaringan aspirasi di pedesaan belum optimal, maka Sekretariat DPRD berisiko kurang maksimal mendukung DPRD menjaring aspirasi kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat pedesaan lambat meningkat.	1. Mengembangkan sistem informasi aspirasi digital yang menjangkau pelosok. 2. Menyusun dashboard data kemiskinan per dapil untuk bekal kunjungan kerja Anggota DPRD.
				Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan SDM di Sekretariat DPRD DIY harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD DIY.	Risiko Sumber Daya Manusia	Perkembangan teknologi informasi yang berjalan sangat cepat	Kesenjangan digital (digital gap) dan keterlambatan adaptasi teknologi oleh SDM Sekretariat	Efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi dan persidangan kepada DPRD terhambat	Karena perkembangan teknologi informasi berjalan sangat cepat, maka berisiko terjadi keterlambatan adaptasi teknologi oleh SDM, sehingga pelayanan administrasi ke DPRD kurang efisien.	1. Melaksanakan pelatihan literasi digital dan upskilling TI secara berkala. 2. Menerapkan sistem kerja berbasis aplikasi (e-risalah, e-aspirasi) disertai pendampingan melekat.
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Huruf	Adanya penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat DPRD DIY untuk tetap konsisten dan maksimal dalam melaksanakan	Risiko Regulasi / Operasional	Adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan dinamika pemerintahan simetris-asimetris	Potensi terjadinya gagap penyesuaian tata kerja dan penurunan konsistensi	Efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap tugas fungsi DPRD	Karena adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris-asimetris, maka berisiko terjadi penurunan konsistensi pelayanan, sehingga efektivitas	1. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja (ANJAB/ABK) pasca-penyederhanaan. 2. Pembuatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Isu Strategis	Kategori Risiko	Pernyataan			Risk Meta-Language	Rencana Tindak Pengendalian
						Sebab	Risiko	Akibat		
	DPRD DIY			pelayanan kepada DPRD DIY sesuai dengan tugas dan fungsinya.			pelayanan kepada DPRD	menjadi kurang maksimal	fasilitasi DPRD kurang maksimal.	Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang adaptif terhadap struktur asimetris.
				Keterbatasan kawasan perkantoran DPRD Jl. Malioboro Nomor 54 Yogyakarta dimana gedung DPRD DIY merupakan heritage dan rencana penerapan Pedestrian Malioboro menyebabkan terbatasnya akses dan mobilitas Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga kinerja menjadi kurang optimal sehingga membutuhkan Gedung baru di lokasi yang baru yang lebih representatif.	Risiko Aset / Sarana Prasarana	Keterbatasan fisik gedung heritage Jl. Malioboro 54 dan rencana penerapan penuh Pedestrian Malioboro	Terbatasnya aksesibilitas dan mobilitas fisik Pimpinan serta Anggota DPRD DIY	Kinerja fasilitasi dan kedewanan menjadi tidak optimal akibat hambatan logistik tempat kerja	Karena adanya keterbatasan gedung heritage dan penerapan Pedestrian Malioboro, maka berisiko membatasi mobilitas Pimpinan/Anggota DPRD, sehingga kinerja kedewanan menjadi kurang optimal.	1. Menyusun feasibility study (studi kelayakan) dan masterplan pembangunan gedung baru. 2.Menyediakan shuttle khusus atau rekayasa akses terbatas selama gedung baru belum terealisasi.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD berdasarkan analisis SWOT dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 18. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi , Arah Kebijakan dan Indikator Kinerja Program Sekretariat DPRD DIY

Visi RPJMD: ***Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi***			
Misi 1 RPJMD: Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;			
Misi 2 RPJMD: Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat			
Misi 4 RPJMD: Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	1. Terfasilitasinya kinerja DPRD	1. Mengoptimalkan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran melalui badan anggaran DPRD 3. Mengoptimalkan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui komisi-komisi 4. Mengoptimalkan fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD 5. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 6. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD 7. Mengoptimalkan fasilitasi tugas-tugas DPRD seperti kunjungan kerja dan keprotokolan 8. Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Visi RPJMD: *Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*			
Misi 3 RPJMD: Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal	2. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY	2. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan kepada DPRD dalam menunjang urusan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD DIY 2. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Keuangan Sekretariat DPRD DIY 3. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD DIY 4. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Kepegawaian di Sekretariat DPRD DIY 5. Meningkatkan fasilitasi Pengadministrasian Umum Sekretariat DPRD DIY 6. Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY 7. Meningkatkan fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD DIY 8. Meningkatkan fasilitasi terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD DIY 9. Meningkatkan fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 10. Meningkatkan fasilitasi layanan administrasi DPRD 11. Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai penjabaran dokumen RPJMD yang ditetapkan dan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator pada Renstra Sekretariat DPRD DIY 2022-2027, bisa dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Program– Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2022 – 2027, pada Sekretariat DPRD DIY telah dilaksanakan proses desain perencanaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan arahan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang menghasilkan/menetapkan 3 (tiga) program 18 kegiatan dan 67 sub kegiatan untuk pelaksanaan selama periode Renstra Tahun 2022-2027 dengan rincian pendanaan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 18, yaitu:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Lebih lanjut terkait program tersebut dapat dilihat pada tabel 18 berikut ini:

Tabel 19. Program, Indikator program dan Keterangan Indikator Program

No	Nama Program	Indikator Program	Meta Indikator Program	Keterangan
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	Jumlah Bahan Acara yang selesai dibagi jumlah Bahan Acara yang direncanakan x 100%	Bahan Acara yang dimaksud adalah materi/masalah yang dibahas di DPRD dengan produk akhir berupa Peraturan Daerah/Peraturan DPRD/Keputusan DPRD/Keputusan Pimpinan DPRD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diperoleh	
3	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Diresmikannya / Dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Penetapan DPRD DIY oleh Pemerintah Pusat	

4.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, 3 (tiga) program yang diampu Sekretariat DPRD DIY dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan sebagai berikut:

4.2.1 Kegiatan dan subkegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai berikut:

1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditetapkannya keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan, dari usulan ekekutif maupun inisiatif DPRD yang dikoordinsaikan oleh Badan Pembentukan Perda/Perdais setelah melalui tahap pembahasan oleh jasa konsultan, Tenaga Ahli/kelompok pakar, forum diskusi dan workshop, hearing dan sosialisasi di masyarakat untuk terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di DIY.

2) Pembahasan Rancangan Perda

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi Panitia Khusus/Alat Kelengkapan Dewan yang diperoleh dari hasil pembahasan rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah serta pengambilan keputusan bersama dalam rapat paripurna yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan kajian dan pengembangan kebijakan berupa evaluasi perda maupun penguatan pengawasan yang dapat digunakan oleh DPRD dalam pengambilan keputusan.

4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dukungan anggaran dalam menyiapkan keputusan dewan, peraturan dewan dan keputusan pimpinan dewan, menyiapkan draft naskah akademik dan draft raperda yang menjadi inisiatif DPRD melalui jasa konsultan, forum diskusi dan workshop yang hasilnya setelah disetujui oleh Badan Pembentukan Perda akan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD bersama eksekutif, terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa serta terbentuknya rekomendasi

sebagai bahan pengambilan keputusan sebagai dasar hukum terkait dengan pelaksanaan pembangunan di DIY.

5) Penyusunan Tata tertib DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyusunan perubahan peraturan DPRD tentang tata tertib menyesuaikan terpilihnya Anggota baru DPRD pada Pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029.

6) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi Kegiatan DPRD dalam rangka mendukung sosialisasi oleh DPRD DIY bersama Pemerintah Daerah DIY terkait produk-produk hukum daerah yang berlaku di DIY kepada masyarakat DIY.

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

7) Pembahasan KUA dan PPAS

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

8) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

9) Pembahasan APBD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

10) Pembahasan Perubahan APBD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran, Komisi-Komisi yang diperoleh

dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

11) Pembahasan Laporan Semester

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

12) Pembahasan Pertanggung jawaban APBD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan Badan Anggaran Komisi-Komisi yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

13) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Pemerintahan dan Hukum.

14) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Infrastruktur.

15) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

16) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai penunjang kegiatan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif melalui mitra kerja komisi Bidang Perekonomian.

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

17) Orientasi DPRD

Kegiatan dimaksudkan untuk memfasilitasi pelaksanaan orientasi anggota DPRD baru yang terpilih pada Pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029 bekerjasama dengan BP SDM kemendagri.

Sesuai PMDN 133/2017 sebagaimana diubah dengan PMDN 14/2018 Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Orientasi dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran, 1 kelas peserta paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 80 (delapan puluh) orang.

18) Pendalaman Tugas DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM dewan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan serta representasinya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Seuai PMDN 133/2017 sebagaimana diubah dengan PMDN 14/2018 Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri. Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan setelah mengikuti Orientasi. Pendalaman Tugas dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendalaman Tugas dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendalaman tugas dilakukan dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan (paling banyak 60 (enam puluh) orang; b. bimbingan teknis (paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan c. workshop/lokakarya/seminar (memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Jumlah peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelas apabila jumlah peserta melebihi dari jumlah paling banyak.

19) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang sosialisasi lembaga DPRD kepada masyarakat DIY tentang kebijakan pemerintah dan produk hukum daerah hasil-hasil kegiatan dewan.

20) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan pakar dan tenaga ahli sebagai penunjang dan pendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD.

Amanat PP No 18 th 2017 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: a. Pimpinan DPRD; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

21) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Kegiatan dimaksudkan untuk menyediakan tenaga ahli fraksi dengan kriteria tertentu sebagai penunjang dan pendukung terlaksananya tugas dan fungsi DPRD.

Sesuai PP No 18 th 2017 TAF merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. TAF ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD, besaran kompensasi TAF diatur dalam Perkada.

22) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik yang dikemas dalam berbagai acara dan kegiatan serta untuk menjalin kemitraan dengan stakeholder Sekretariat DPRD dan DPRD seperti wartawan, media cetak dan media elektronik serta mitra kerja dewan lainnya.

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

23) Kunjungan Kerja Dalam Daerah

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah DPRD dalam rangka melaksanakan ketugasan DPRD seperti pansus, komisi maupun menghadiri undangan ke dalam daerah

DIY yang merupakan rangkaian proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

24) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan dewan tentang pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah serta masukan aspirasi dari masyarakat yang diperoleh sesuai dengan kewenangan masing-masing.

25) Pelaksanaan Reses

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terjaringnya aspirasi masyarakat pada 5 Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil reses. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kabupaten/Kota, pertemuan/konsultasi/diskusi dengan masyarakat/dinas/instansi terkait di Kabupaten/Kota.

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

26) Penyusunan Kode Etik DPRD

Kegiatan dimaksudkan untuk memfasilitasi penyusunan kode etik DPRD untuk mengakomodir Anggota terpilih pada Pemilu tahun 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029.

27) Pengawasan Kode Etik DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi Badan Kehormatan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

7. Fasilitasi Tugas DPRD

28) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dalam maupun luar negeri dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

29) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tercetaknya laporan hasil kerja DPRD yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk tahun pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun berikutnya.

30) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Merupakan kegiatan yang semula Penyusunan Program Kerja DPRD dan dimaksudkan untuk menyesuaikan nomenklatur subkegiatan sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/rekomendasi Badan Musyawarah yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

31) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan seperti penyediaan fasilitasi tamu pimpinan dan alat kelengkapan dewan lainnya yang hasilnya akan menjadi bahan masukan pengambilan kebijakan yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan serta keputusan/rekomendasi alat kelengkapan pimpinan dewan yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan.

32) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi Panitia Khusus yang diperoleh dari hasil pembahasan rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi, rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah serta pengambilan keputusan bersama dalam rapat paripurna yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4.2.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut:

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

33) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD DIY selama satu tahun.

34) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan keprotokoleran pimpinan dan anggota dewan berupa penyediaan pakaian dinas dan pakaian bercirikhas daerah.

35) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan dukungan Kesehatan kepada pimpinan dan anggota dewan berupa pemeriksaan kesehatan *medical check up* sekali dalam satu tahun

9. Layanan Adminstrasi DPRD

36) Fasilitasi Fraksi DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya fasilitasi terhadap TAF administrasi dan staf fraksi dalam menyiapkan rekomendasi/kebijakan fraksi baik dalam bentuk surat ataupun naskah pidato pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi dan dokumen lainnya yang menjadi kewenangan fraksi.

Belanja sekretariat fraksi merupakan salah satu belanja penunjang kegiatan DPRD, yang terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. Sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor. berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD DIY Nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, Untuk pelaksanaan tugas sekretariat Fraksi disediakan tenaga, sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Tenaga sekretariat Fraksi harus memenuhi klasifikasi yang ditentukan Fraksi.

Penyediaan tenaga sekretariat Fraksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

37) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah keputusan/ rekomendasi alat kelengkapan dan Rekomendasi DPRD DIY yang diperoleh dari hasil rapat-rapat konsultasi, rapat koordinasi rapat kerja, kunjungan kerja dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang merupakan proses pembentukan produk-produk hasil kerja DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

10. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

38) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan atau penyusunan program merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyusun program dan kegiatan yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) OPD dengan tujuan menyusun dokumen perencanaan bagi OPD yang bersangkutan meliputi Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, Rencana Strategis OPD, Kerangka Acuan Kerja.

39) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sebagai penjabaran dokumen perencanaan setiap OPD Menyusun dokumen anggaran berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran yang akan dibahas bersama TAPD dan DPRD dan setelah memperoleh evaluasi dari kementerian dalam negeri menghasilkan dokumen DPA-SKPD yang menjadi pedoman bagi PPTK dalam melaksanakan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

40) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh OPD untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan tujuan melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD yang bersangkutan serta memonitoring tindak lanjut LHP dan APIP.

11. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

41) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi penatausahaan barang milik daerah SKPD dengan lancar dan tepat waktu.

12. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

42) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai dengan lancar.

43) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendidikan, pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan lancar.

13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

44) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Sekretariat DPRD DIY selama 1 tahun.

45) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan lancar dan tepat waktu.

46) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD.

47) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dan menghasilkan laporan OPD.

14. Administrasi Umum Perangkat Daerah

48) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan penerangan ruang rapat dan bangunan kantor dengan baik.

49) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti ATK.

50) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, piring saji dan sendok saji.

51) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan seperti amplop surat menyurat.

52) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Hasil yang akan dicapai dan pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi baik di dalam maupun ke luar daerah.

15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

53) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

54) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

55) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraaan Dinas Jabatan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasarana berupa kendaraan dinas kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

56) Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana berupa kendaraan dinas kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

57) Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sarana dan prasarana berupa mebel untuk gedung baru DPRD DIY pada tahun 2024 hingga tahun 2026 untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

58) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya sarana prasana gedung kantor untuk kelancaran kegiatan alat kelengkapan dewan.

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

59) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

60) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.

17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

61) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jabatan Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD sesuai standar.

62) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD sesuai standar.

63) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

64) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor DPRD untuk menunjang penataan kawasan perkantoran DPRD DIY.

65) Pemeliharaan Mebel

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan mebel dengan baik.

66) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai standar.

4.3 Kegiatan dan subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur sebagai berikut:

18. Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

67) Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur pada periode 2027-2032 pada tahun 2027.

4.4 Kegiatan dan subkegiatan pada Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan sebagai berikut:

19. Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara

68) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan urusan kelembagaan dan tata cara.

Untuk tahun Renstra 2022-2027, Pengendalian dan pemulihan sosial, ekonomi dan kesehatan sebagai dampak dari pandemi Covid 19 tetap diperlukan meskipun tidak sebesar pada penganggaran tahun sebelumnya. Adapun gambaran target kinerja dan pendanaan indikatif Renstra Sekretariat DPRD DIY selama Periode Tahun 2022 -2027, bisa dijelaskan pada Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Tabel 19 di halaman selanjutnya.

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rencana Strategis Periode Tahun 2022-2027

Nama OPD: Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal				Kepuasan pelayanan kepada DPRD	80%	80%		82%		83%		84%		85%		86%		86%		Sekretariat DPRD	Target Semula
						80%		82%		83%		93%		94%		95%		95%		Sekretariat DPRD	Target Penyelarasan
	Terfasilitasinya Kinerja DPRD			Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,5%	95,5%		95,5%		96%		96%		96,5%		97%		97%		Sekretariat DPRD	Target Semula
						95,5%		95,5%		96%		97%		100%		100%		100%		Sekretariat DPRD	Target Penyelarasan
		4.01.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKA	Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	100%	100%	2.101.873.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	Nilai "1"	4.785.950.000	Nilai "1"	4.785.950.000	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			N, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY																		
		4.01.11.5.01	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	100%	2.101.873.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	Nilai "1"	4.785.950.000	Nilai "1"	4.785.950.000	Sekretariat DPRD	
		4.01.11.5.01.02	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	3 keputusan	3 keputusan	2.101.873.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	Nilai "1"	4.785.950.000		4.785.950.000	Sekretariat DPRD	
		4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS**	**Persentase Bahan Acara yang selesai**	**95.5%**	**95.5%**	**65.489.825.250**	**95.5%**	**60.758.583.900**	**96%**	**88.759.958.000**	**96%**	**89.814.344.000**	**96,5%**	**93.578.455.000**	**97%**	**97.321.593.200**	**97%**	**430.232.934.100**	**Sekretariat DPRD**	**Target Semula**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			DAN FUNGSI DPRD	**sesuai dengan program kerja DPRD DIY**																	
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata	95.5%	95.5%	12.145.121.000	95.5%	14.120.123.900	96%	15.788.517.000	96%	19.199.980.000	96.5%	14.967.976.960	97%	15.366.696.038	97%	79.443.293.898	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Tertib DPRD																	
		4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 dokumen	10 dokumen	2.702.513.500	10 dokumen	2.723.095.800	10 dokumen	2.988.235.000	10 dokumen	3.107.764.000	10 dokumen	3.232.074.000	10 dokumen	3.361.356.960		15.412.525.760	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	12 dokumen	12 dokumen	6.004.476.000	12 dokumen	6.883.380.300	12 dokumen	7.790.038.000	16 dokumen	8.101.639.000	16 dokumen	3.425.704.000	16 dokumen	3.362.732.160		29.563.493.460	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4 dokumen kajian dan 1 tahun	4 dokumen kajian dan 1 tahun	756.112.500	8 dokumen	1.294.723.100	8 dokumen	1.039.994.000	8 dokumen	1.081.593.000	8 dokumen	1.124.856.000	8 dokumen	1.169.850.240		5.711.016.340	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	154 draf dan 5 draft raperda dan NA	154 draf dan 5 draft raperda dan NA	2.682.019.000	158 dokumen	3.218.924.700	158 dokumen	3.170.250.000	158 dokumen	3.297.060.000	158 dokumen	3.428.942.000	158 dokumen	3.566.099.680		16.681.276.380	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	n/a	n/a	0	n/a	0	1 dokumen	800.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0		800.000.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	22.000 Orang	3.611.924.000	23.000 Orang	3.756.400.960	24.000 Orang	3.906.656.998		11.274.981.958	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Pemerintah Daerah																	
		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	95.5%	95.5%	2.161.867.500	95.5%	2.030.489.900	96%	2.412.504.000	96%	2.509.001.000	96.5%	2.609.358.000	97%	2.713.732.320	97%	12.275.085.220	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Bahan Acara	1 Bahan Acara	428.592.000	2 dokumen	447.739.100	2 dokumen	501.655.000	2 dokumen	521.721.000	2 dokumen	542.589.000	2 dokumen	564.292.560		2.577.996.660	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Bahan Acara	1 Bahan Acara	105.262.000	2 Dokumen	105.397.400	2 Dokumen	120.320.000	2 Dokumen	125.132.000	2 Dokumen	130.137.000	2 Dokumen	135.342.480		616.328.880	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Bahan Acara	1 Bahan Acara	590.877.000	1 dokumen	480.194.200	1 dokumen	649.336.000	1 dokumen	675.309.000	1 dokumen	702.321.000	1 dokumen	730.413.840		3.237.574.040	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Bahan Acara	1 Bahan Acara	435.791.000	1 Dokumen	421.359.200	1 Dokumen	484.345.000	1 Dokumen	503.718.000	1 Dokumen	523.866.000	1 Dokumen	544.820.640		2.478.108.840	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan	1 Bahan Acara	1 Bahan Acara	47.420.500	1 dokumen	43.171.400	1 dokumen	49.989.000	1 dokumen	51.988.000	1 dokumen	54.067.000	1 dokumen	56.229.680		255.445.080	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester																	
		4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Bahan Acara	1 Bahan Acara	553.925.000	1 dokumen	532.628.600	1 dokumen	606.859.000	1 dokumen	631.133.000	1 dokumen	656.378.000	1 dokumen	682.633.120		3.109.631.720	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksanaya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan	95.5%	95.5%	948.120.000	95.5%	747.573.600	96%	1.096.884.000	96%	1.140.756.000	96.5%	1.357.936.000	97%	1.412.253.440	97%	5.755.403.040	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																	
		4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 kajian	4 kajian	234.375.000	6 laporan	382.010.400	5 laporan	274.221.000	5 laporan	285.189.000	6 laporan	468.148.000	5 laporan	486.873.920		1.896.442.320	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang	4 kajian	4 kajian	237.915.000	4 laporan	121.854.400	5 laporan	274.221.000	5 laporan	285.189.000	5 laporan	296.596.000	5 laporan	308.459.840		1.286.320.240	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Infrastruktur																	
		4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 kajian	4 kajian	237.915.000	4 laporan	121.854.400	5 laporan	274.221.000	5 laporan	285.189.000	5 laporan	296.596.000	5 laporan	308.459.840		1.286.320.240	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 kajian	4 kajian	237.915.000	4 laporan	121.854.400	5 laporan	274.221.000	5 laporan	285.189.000	5 laporan	296.596.000	5 laporan	308.459.840		1.286.320.240	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	95.5%	95.5%	18.698.123.500	95.5%	20.202.260.800	96%	26.465.827.000	96%	26.692.459.000	96.5%	27.760.154.000	97%	28.870.560.160	97%	129.991.260.960	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	n/a	n/a	0	n/a	0	1 dokumen	800.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0		800.000.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 kali	5 kali	3.721.939.000	4 dokumen	2.334.734.800	6 dokumen	3.713.925.000	6 dokumen	3.862.482.000	6 dokumen	4.016.981.000	6 dokumen	4.177.660.240		18.105.783.040	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3 jenis, 1 peraturan dan 8 Perda	3 jenis, 1 peraturan dan 8 Perda	7.352.636.000	13 dokumen	11.077.690.800	16 dokumen	13.499.902.000	16 dokumen	10.427.974.000	16 dokumen	10.845.092.040	16 dokumen	11.278.895.722		57.129.554.562	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 laporan	18 laporan	1.446.526.000	18 Orang	1.598.326.300	18 Orang	1.662.259.000	18 Orang	1.728.749.000	18 Orang	1.797.898.000	18 Orang	1.869.813.920		8.657.046.220	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 laporan	84 laporan	799.559.000	7 orang	813.262.600	7 orang	822.809.000	7 orang	855.721.000	7 orang	889.949.000	7 orang	925.546.960		4.307.288.560	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	11 laporan bulanan, 11 laporan, 3000 share konten dan 4 jenis kegiatan	11 laporan bulanan, 11 laporan, 3000 share konten dan 4 jenis kegiatan	5.377.463.500	32 dokumen	4.378.246.300	33 dokumen	5.966.932.000	33 dokumen	6.205.609.000	33 dokumen	6.453.833.000	33 dokumen	6.711.986.320		29.716.606.620	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	95.5%	95.5%	6.882.849.500	95.5%	5.083.196.500	96%	12.248.679.000	96%	12.738.625.000	96.5%	13.248.169.000	97%	13.778.095.760	97%	57.096.765.260	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	n/a	n/a	0	n/a	0	60 laporan	1.400.490.000	60 laporan	1.456.509.000	60 laporan	1.514.769.000	60 laporan	1.575.359.760		5.947.127.760	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 kali	3 kali	191.037.000	1 dokumen	405.403.300	1 dokumen	225.826.000	1 dokumen	234.859.000	1 dokumen	244.253.000	1 dokumen	254.023.120		1.364.364.420	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Laporan	3 Laporan	6.691.812.500	2 dokumen	4.677.793.200	3 dokumen	10.622.363.000	3 dokumen	11.047.257.000	3 dokumen	11.489.147.000	3 dokumen	11.948.712.880		49.785.273.080	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD	95.5%	95.5%	763.899.000	95.5%	359.657.900	96%	1.238.166.000	96%	455.692.000	96.5%	473.919.000	97%	492.875.760	97%	3.020.310.660	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	n/a	n/a	0	n/a	0	1 dokumen	800.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0		800.000.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode	3 laporan	3 laporan	763.899.000	3 laporan	359.657.900	3 laporan	438.166.000	3 laporan	455.692.000	3 laporan	473.919.000	3 laporan	492.875.760		2.220.310.660	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Etik DPRD																	
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	95.5%	95.5%	23.889.844.750	95.5%	18.215.281.300	96%	29.509.381.000	96%	30.689.755.000	96.5%	36.917.343.000	97%	38.594.036.720	97%	153.925.797.020	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	22 laporan 12 bulan	22 laporan 12 bulan	17.989.938.500	25 dokumen	8.877.645.500	40 dokumen	22.422.413.000	40 dohhkumen	23.319.309.000	40 dokumen	24.252.081.000	40 dokumen	25.222.164.240		104.093.612.740	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																	D DIY
		4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	27.726.000	1 laporan	30.207.000	1 laporan	31.525.000	1 laporan	32.786.000	1 laporan	34.097.000	1 laporan	35.460.880		164.075.880	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	n/a	n/a	1.651.229.000	14 dokumen	1.344.419.200	14 dokumen	1.947.854.000	14 dokumen	2.025.768.000	14 dokumen	2.106.798.000	14 dokumen	2.191.069.920		9.615.909.120	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 laporan dan 70%	12 laporan dan 70%	4.220.951.250	13 dokumen	7.963.009.600	13 dokumen	5.107.589.000	13 dokumen	5.311.892.000	13 dokumen	5.524.367.000	13 dokumen	5.745.341.680		29.652.199.280	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	16 Dokumen	5.000.000.000	16 Dokumen	5.400.000.000		10.400.000.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY			**Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY**	**A**	**A (87,61%)**		**A (88%)**		**A (88,5)**		**A (88.76)**		**A (89.00)**		**A (89.50)**		**A (89.50)**		**Sekretariat DPRD**	**Target Semula**
						A (87,61%)		**A (88%)**		**A (88,5)**		**A (88.76)**		**A (89.74)**		**A (90.00)**		**A (90.00)**		**Sekretariat DPRD**	**Target Penyelarasan**
		0.00.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**87,61%**	**87,61%**	**65.586.465.014**	**88%**	**73.701.502.316**	**88,5%**	**187.419.781.983**	**89%**	**275.833.690.555**	**89.5%**	**136.660.046.066**	**89.5%**	**80.810.397.200**	**89.5%**	**754.425.418.120**	**Sekretariat DPRD**	
		0.00.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Terlaksanaya Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	79.800.000	100%	102.747.800	100%	131.834.000	100%	137.106.000	100%	142.588.000	100%	148.291.520	100%	662.567.320	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Perangkat Daerah	Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
		0.00.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	41.352.000	5 dokumen	35.726.900	5 dokumen	60.059.000	5 dokumen	62.461.000	5 dokumen	64.959.000	5 dokumen	67.557.360		290.763.260	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	0	4 dokumen	32.438.600	4 dokumen	33.470.000	4 dokumen	34.808.000	4 dokumen	36.199.000	4 dokumen	37.646.960		174.562.560	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 Nilai AKIP (A) dan 2 dokumen	80 Nilai AKIP (A) dan 2 dokumen	38.448.000	3 laporan	34.582.300	3 laporan	38.305.000	3 laporan	39.837.000	3 laporan	41.430.000	3 laporan	43.087.200		197.241.500	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusun	100%	100%	10.816.036.759	100%	9.876.109.335	100%	11.264.358.000	100%	11.714.931.000	100%	12.183.527.000	100%	12.670.868.080	100%	57.709.793.415	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				an Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
		0.00.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	10.699.486.259	80 Orang/ Bulan	9.744.480.235	90 Orang/ Bulan	11.127.465.000	100 Orang/ Bulan	11.572.563.000	100 Orang/ Bulan	12.035.465.000	100 Orang/ Bulan	12.516.883.600		56.996.856.835	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	58.920.000	12 dokumen	58.920.000	12 dokumen	61.276.000	12 dokumen	63.727.000	12 dokumen	66.276.000	12 dokumen	68.927.040		319.126.040	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan	1 laporan	28.000.000	1 laporan	12.900.000	1 laporan	13.416.000	1 laporan	13.952.000	1 laporan	14.510.000	1 laporan	15.090.400		69.868.400	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		0.00.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen, 12 dokumen, 1 dokumen	1 dokumen, 12 dokumen, 1 dokumen	29.630.500	13 laporan	59.809.100	13 laporan	62.201.000	13 laporan	64.689.000	13 laporan	67.276.000	13 laporan	69.967.040		323.942.140	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik	100%	100%	20.400.000	100%	21.403.000	100%	28.274.000	100%	29.404.000	100%	30.579.000	100%	31.802.160	100%	141.462.160	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Daerah pada SKPD																	
		0.00.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun	1 tahun	20.400.000	14 laporan	21.403.000	14 laporan	28.274.000	14 laporan	29.404.000	14 laporan	30.579.000	14 laporan	31.802.160		141.462.160	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanaya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	n/a	n/a	0	100%	355.907.600	100%	385.275.000	100%	400.685.000	100%	416.711.000	100%	433.379.440	100%	1.991.958.040	Sekretariat DPRD	
		0.00.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring,	n/a	n/a	0	16 dokumen	4.412.600	16 dokumen	18.629.000	16 dokumen	19.374.000	16 dokumen	20.148.000	16 dokumen	20.953.920		83.517.520	Sekretariat	Sekretariat DPR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
			Kinerja Pegawai	Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																DPRD	D DIY
		0.00.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n/a	n/a	0	22 Orang	351.495.000	22 Orang	366.646.000	22 Orang	381.311.000	22 Orang	396.563.000	22 Orang	412.425.520		1.908.440.520	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyedia	100%	100%	1.431.119.000	100%	1.291.463.100	100%	1.531.318.000	100%	1.592.568.000	100%	1.656.267.000	100%	1.722.517.680	100%	7.794.133.780	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				an Barang Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
		0.00.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 jenis	7 jenis	32.003.000	6 paket	33.577.300	8 paket	35.018.000	8 paket	36.418.000	8 paket	37.874.000	8 paket	39.388.960		182.276.260	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Alat Tulis Kantor 27 jenis bahan	Alat Tulis Kantor 27 jenis bahan	294.681.000	5 paket	162.290.100	5 paket	217.963.000	5 paket	226.681.000	5 paket	235.747.000	5 paket	245.176.880		1.087.857.980	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Kantor yang Disediakan	kelengkapan penanggulangan covid 10 jenis Jumlah dokumen yang terkirim tepat waktu 12 pkt pembelian bendera 1 pkt pengisian tabung gas dan pemadam kebakaran 1 tahun	kelengkapan penanggulangan covid 10 jenis Jumlah dokumen yang terkirim tepat waktu 12 pkt pembelian bendera 1 pkt pengisian tabung gas dan pemadam kebakaran 1 tahun															
		0.00.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	n/a	n/a	0	4 paket	23.146.700	5 paket	10.215.000	5 paket	10.623.000	5 paket	11.047.000	5 paket	11.488.880		66.520.580	Sekretariat	Sekretariat DPR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Tanggayang Disediakan																DPRD	D DIY
		0.00.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Barang cetakan 14 jenis Jasa pengelola arsip 8 orang 12 bulan Jumlah materi yang digandakan 4 materi/ bahan	Barang cetakan 14 jenis Jasa pengelola arsip 8 orang 12 bulan Jumlah materi yang digandakan 4 materi/ bahan	125.418.000	2 paket	146.699.000	2 paket	147.713.000	2 paket	153.621.000	2 paket	159.765.000	2 paket	166.155.600		773.953.600	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi 12 bulan Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi 12 bulan	Laporan dan rencana tindaklanjut hasil konsultasi 12 bulan Laporan dan rencana tindaklanjut hasil rapat koordinasi 12 bulan	979.017.000	24 laporan	925.750.000	24 laporan	1.120.409.000	24 laporan	1.165.225.000	24 laporan	1.211.834.000	24 laporan	1.260.307.360		5.683.525.360	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	2.428.182.000	100%	5.444.452.600	100%	116.632.694.983	100%	202.236.973.555	100%	60.096.437.066	100%	1.183.245.440	100%	385.593.803.644	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				, Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dan pengadaan mebel																	
		0.00.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	0	4 unit	2.800.000.000	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0		2.800.000.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	2 unit	2 unit	977.290.000	n/a	0	n/a	0	4 unit	2.800.000.000	n/a	0	n/a	0		2.800.000.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Disediakan																	
		0.00.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	0	2 Paket	79.913.900	0	0	10 paket	2.000.000.000	10 paket	2.080.000.000	n/a	0		4.159.913.900	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis	Peralatan kantor sesuai RKBMD 3 jenis	91.650.000	99 unit	1.707.360.700	110 unit	1.051.903.000	110 unit	1.093.978.000	110 unit	1.137.736.000	110 unit	1.183.245.440		6.174.223.140	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	1.304.582.000	1 unit	857.178.000	1 unit	115.553.461.983	1 unit	196.342.995.555	1 unit	56.848.638.066	n/a	0		369.602.273.604	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	6 unit	6 unit	54.660.000	n/a	0	3 unit	27.330.000	n/a	0	3 unit	30.063.000	n/a	0		57.393.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Bangunan Lainnya yang Disediakan																	
		0.00.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	3.112.998.800	100%	3.289.139.500	100%	3.308.326.000	100%	3.440.658.000	100%	3.578.283.000	100%	3.721.414.320	100%	17.337.820.820	Sekretariat DPRD	
		0.00.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 bulan	12 bulan	1.086.926.000	60 laporan	1.168.163.500	60 laporan	1.200.160.000	60 laporan	1.248.166.000	60 laporan	1.298.092.000	60 laporan	1.350.015.680		6.264.597.180	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan																	
		0.00.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	2.026.072.800	60 laporan	2.120.976.000	60 laporan	2.108.166.000	60 laporan	2.192.492.000	60 laporan	2.280.191.000	60 laporan	2.371.398.640		11.073.223.640	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa	100%	100%	1.896.407.042	100%	2.176.585.672	100%	2.096.122.000	100%	2.158.124.000	100%	2.267.486.000	100%	2.359.183.840	100%	11.057.501.512	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana																	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
		0.00.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Bukti pembayaran pajak/ STNK/ KIR kendaraan dinas/ Jabatan 5 unit Mobil Jabatan yang dipelihara sesuai RKPBMD 5 unit	Bukti pembayaran pajak/ STNK/ KIR kendaraan dinas/ Jabatan 5 unit Mobil Jabatan yang dipelihara sesuai RKPBMD 5 unit	334.086.400	5 unit	434.187.500	5 unit	420.980.000	5 unit	437.819.000	5 unit	455.331.000	5 unit	473.544.240		2.221.861.740	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	0	n/a	0	3 Unit	20.000.000	n/a	0	3 Unit	22.000.000	1 Unit	22.880.000		64.880.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bukti pembayaran pajak/ STNK/ KIR kendaraan dinas/ operasional 28 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPB	Bukti pembayaran pajak/ STNK/ KIR kendaraan dinas/ operasional 28 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 2 yang dipelihara sesuai RKPB	650.486.500	29 unit	738.031.300	29 unit	645.048.000	29 unit	670.849.000	29 unit	697.682.000	29 unit	725.589.280		3.477.199.580	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					MD 12 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPB MD 16 unit	MD 12 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara sesuai RKPB MD 16 unit															
		0.00.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	0	n/a	0	20 unit	1.000.000	n/a	0	20 unit	1.040.000	20 unit	2.080.000		4.120.000	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPB MD 2 jenis Perlengkapan	Peralatan gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPB MD 2 jenis Perlengkapan	312.306.500	274 unit	250.710.600	274 unit	263.016.000	274 unit	273.536.000	274 unit	284.477.000	274 unit	295.856.080		1.367.595.680	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD 5 jenis	Gedung Kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD 5 jenis															
		0.00.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bukti pembayaran retribusi sampah perkotaan yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan Gedung kantor seluas 333.470 m2 yang terpelihara kebers	Bukti pembayaran retribusi sampah perkotaan yang dibayarkan tepat waktu 12 bulan Gedung kantor seluas 333.470 m2 yang terpelihara kebers	599.527.642	3 Unit	753.656.272	3 Unit	746.078.000	3 Unit	775.920.000	3 Unit	806.956.000	1 Unit	839.234.240		3.921.844.512	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					ihannya 12 bulan Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD 6750 m2 Keamanan kantor terjaga dengan baik oleh 25 orang	ihannya 12 bulan Gedung kantor yang dipelihara sesuai RKPBMD 6750 m2 Keamanan kantor terjaga dengan baik oleh 25 orang																
		0.00.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	100%	100%	41.675.991.413	100%	46.350.306.509	100%	47.482.732.000	100%	49.382.040.000	100%	51.357.320.000	100%	53.411.612.800	100%	247.984.011.309	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
				DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																	
		0.00.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	1 tahun	1 tahun	40.938.231.413	55 Orang/ Bulan	45.990.213.509	55 Orang/ Bulan	46.690.416.000	55 Orang/ Bulan	48.558.032.000	55 Orang/ Bulan	50.500.353.000	55 Orang/ Bulan	52.520.367.120		244.259.381.629	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	55 stel dan 305 stel	55 stel dan 305 stel	485.448.000	55 paket	84.651.100	55 paket	505.857.000	55 paket	526.091.000	55 paket	547.134.000	55 paket	569.019.360		2.232.752.460	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang dan 12 bulan	55 orang dan 12 bulan	252.312.000	55 orang	275.441.900	55 orang	286.459.000	55 orang	297.917.000	55 orang	309.833.000	55 orang	322.226.320		1.491.877.220	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		0.00.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100%	100%	4.125.530.000	100%	4.793.387.200	100%	4.558.848.000	100%	4.741.201.000	100%	4.930.848.000	100%	5.128.081.920	100%	24.152.366.120	Sekretariat DPRD	
		0.00.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	84 PA, 84 PU dan 84 Rekomendasi	84 PA, 84 PU dan 84 Rekomendasi	2.569.541.000	196 laporan	2.945.549.900	252 laporan	2.693.335.000	252 laporan	2.801.068.000	252 laporan	2.913.110.000	252 laporan	3.029.634.400		14.382.697.300	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY
		0.00.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan dan rencana tindaklanjut hasil kerja komisi 1 laporan Rapur	Laporan dan rencana tindaklanjut hasil kerja komisi 1 laporan Rapur	1.555.989.000	14 laporan	1.847.837.300	146 laporan	1.865.513.000	141 laporan	1.940.133.000	141 laporan	2.017.738.000	141 laporan	2.098.447.520		9.769.668.820	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Awal Kinerja Program Baseline (2022)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Ket.
								Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					DPRD yang tersele nggara 6 kali rapur	DPRD yang tersele nggara 6 kali rapur															
Total							**133.178.163.264**		**134.460.086.216**		**276.179.739.983**		**365.648.034.555**		**230.238.501.066**		**182.917.940.400**		**1.189.444.302.220**		

Sumber: Sekretariat DPRD DIY (2026)

4.5 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka penyelarasan antara IKU Gubernur sesuai dengan RPJMD DIY 2022-2027 dengan IKK OPD, maka IKU dan IKK OPD Sekretariat DPRD DIY yang ditentukan untuk mempertajam sasaran dan indikator dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD DIY

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)						Ket.
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB								
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	Kepuasan Pelayanan Kepada DPRD	%	131.650.228.764	131.660.086.216	175.399.073.119	326.833.476.699	280.476.190.150	148.486.834.070	
2	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	%	66.091.698.250	60.758.583.900	60.568.882.800	61.820.426.552	71.039.516.000	74,565,422,830	
3	Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Huruf	65.558.530.514	70.901.502.316	114.830.190.319	265.013.050.147	209.436.674.150	77,434,973,632	

Sumber Data: Sekretariat DPRD DIY (2026)

Tabel 22. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD DIY

No	Indikator	Satuan	Anggaran (Rp)						Ket.
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN WAJIB								
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	Presentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	%	66.091.698.250	60.758.583.900	60.568.882.800	61.820.426.552	71.039.516.000	74,565,422,830	

Sumber Data: Sekretariat DPRD DIY (2026)

Berdasarkan tabel di atas, yang dimaksud dengan agenda DPRD ialah semua kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi dewan (anggaran, pembentukan perda dan pengawasan) serta jaring aspirasi sebagai representasi rakyat yang diwakili. Sekretariat DPRD dalam merencanakan anggaran tahun berjalan tidak saja memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan, namun juga berdasarkan laporan hasil evaluasi dan monitoring dan perkembangan pelaksanaan kegiatan DPRD DIY tahun-tahun sebelumnya. Hal ini perlu dipahami dan dimengerti oleh perencana anggaran dalam penyusunan anggaran Sekretariat DPRD DIY pada pengusulan-pengusulan anggaran tidak hanya sekedar menerima semua usulan anggaran namun juga perlu

menggunakan evaluasi dan monitoring serta LKjIP dan laporan kinerja keuangan pada tahun-tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan sesuai target setiap tahun renstra sebelumnya, diselaraskan dengan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD dan Sekretariat DPRD yang menjadi fasilitator dan dukungan kepada DPRD telah dilakukan perubahan *output* kinerja dalam cascading renstra setwan tahun 2022-2027.

Selanjutnya dalam merencanakan anggaran pada Renstra Sekretariat DPRD DIY periode tahun 2022 s/d 2027, usulan-usulan kegiatan dan pendanaan direncanakan dengan melihat hasil evaluasi tahun-tahun kinerja DPRD dan tahun politik yang sedang berjalan sehingga berdasarkan laporan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi Sekretariat DPRD diharapkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan secara bertahap dapat dicapai 100% sesuai target akhir di tahun 2027. Selain itu, dalam rangka mendukung program nasional Presiden/Asta Cita, program dan kegiatan Sekretariat DPRD DIY dapat disajikan dalam tabel berikut sesuai Asta Cita 7:

Tabel 23. Dukungan Sekretariat DPRD DIY Terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran (Rp)					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	2,679,743,000	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	-	-	952.407.200	-	-	-
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2,635,403,500	2.303.033.800	1.500.592.700	1.053.794.000	1.592.222.950	1,669,394,850
			Pembahasan Rancangan Perda	8,517,343,750	8.649.408.300	6.130.062.000	6.135.131.000		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1,031,192,500	1.361.170.100	933.285.900	1.217.967.856	1.480.603.500	1,169,454,000
			Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2,343,319,000	2.664.625.200	3.162.741.000	1.492.973.500	1.519.640.000	1,240,170,180
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	-	430.828.000	-	-	-
			Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.863.714.750	10.600.291.200	7,082,422,000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	337,288,000	412.705.100	446.775.000	379.294.000	496.302.000	541,048,500

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran (Rp)					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	55,542,000	105.397.400	98.651.000	83.351.000	97.208.950	97,278,000
			Pembahasan APBD	590,877,000	446.942.200	498.759.000	141.647.000	540.730.400	584,631,500
			Pembahasan Perubahan APBD	358,093,000	340.139.200	450.392.000	100.814.000	123.206.400	123,132,000
			Pembahasan Laporan Semester	7,985,500	3.811.400	21.145.500	37.460.000	41.503.500	41,227,000
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	316,738,000	415.117.600	482.850.500	108.727.000	122.986.500	122,793,000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	439,139,000	428.130.400	1.320.392.600	1.333.314.000	1.195.227.600	1,213,636,000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	237,915,000	160.334.400	810.079.600	1.484.003.000	1.081.798.600	1,100,207,000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	237,915,000	160.334.400	783.736.600	875.799.000	1.081.642.600	1,100,207,000
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	237,915,000	160.334.400	900.886.600	1.653.095.000	1.081.798.600	1,100,207,000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	-	-	1.111.411.000	-	-	-
			Pendalaman Tugas DPRD	3,545,831,000	3.084.260.300	4.089.047.000	4.677.077.200	3.202.354.800	3,247,901,000
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8,961,996,000	15.740.019.900	3.564.822.000	230.053.200	207.266.250	212,995,400
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1,206,526,000	1.382.326.300	1.170.783.500	2.496.867.000	2.554.315.500	2,563,989,500
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	793,265,000	809.137.600	669.223.500	728.647.000	781.058.600	781,018,000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5,030,592,250	4.562.507.700	4.398.761.600	5.473.644.796	5.225.742.850	5,197,377,000
			Penyusunan Program Kerja DPRD	1,442,151,000	-	-	-	-	-

No.	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran (Rp)					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	191,037,000	49.809.300	227.697.000	239.381.400	355.993.450	372,779,500
			Pelaksanaan Reses	6,647,812,500	6.970.986.700	4.452.468.000	6.921.413.000	4.548.481.000	6,850,983,500
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	-	482.849.500	-	-	-
			Pengawasan Kode Etik DPRD	712,981,000	239.107.900	362.548.000	59.402.400	241.813.800	298,417,000
		Fasilitasi Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	19,782,296,750	5.654.633.500	15.012.970.900	7.523.534.500	11.586.354.000	12,775,100,000
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	27,726,000	30.207.000	35.369.000,	15.265.400	21.253.600	17,760,000
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	989.501.200	1.518.862.000	523.882.300	1.116.912.450	1,457,776,500
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5,252,705,250	9.226.080.600	10.032.257.600	10.942.233.500	11.763.739.450	10,607,865,500
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	-	-	-	8.379.067.450	8,654,263,900
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40,967,225,340	42.215.620.309	44.080.841.509	45.285.399.860	45.233.869.489	45,025,158,562
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	485,448,000	83.751.100	625.739.500	477.978.000	562.438.000	422,742,000
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	256,649,000	259.798.300	299.282.000	298.953.000	287.686.000	276,745,000
		Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	2,569,541,000	2.733.390.900	3.105.495.999	2.775.867.204	2.469.331.500	6,290,762,000
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1,314,789,000	1.537.641.000	748.122.000	715.433.000	651.755.000	644,620,000

BAB V
PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 ini merupakan acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan dan bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergisitas antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD DIY dan atau dengan Dinas, Badan, Lembaga, dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD DIY sesuai dengan tuntutan masyarakat. Selain itu diharapkan pula Sekretariat DPRD DIY akan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi yang optimal kepada Anggota DPRD DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan perubahan kondisi dan situasi di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang menjadi acuan pelaksana kegiatan. Keberhasilan untuk dapat melaksanakan Rencana Strategis Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak di semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD DIY.

Demikian diharapkan agar Perubahan Renstra Sekretariat DPRD DIY Tahun 2022-2027 ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sekretariat DPRD DIY.

CASCADING PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Visi

Terwujudnya Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Misi 3

Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI

Tujuan

Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI

Indikator	Target: Tahun 2021 (Baseline)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Akhir Periode (Tahun 2027)
Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	A	A

Sasaran

Meningkatnya Good Governance

Indikator	Target: Tahun 2021 (Baseline)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Akhir Periode (Tahun 2027)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Program Pemda

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Indikator	Target: Tahun 2021 (Baseline)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Akhir Periode (Tahun 2027)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.73	85.74	86.75	87.76	88.77	89.78	90.79	90.79
Indeks Kematangan	3.49	3.54	3.59	3.64	3.69	3.74	3.79	3.79

Cascading OPD (Sekretariat DPRD DIY)***

TUJUAN OPD (ULTIMATE OUTCOME)

Tercapainya kualitas layanan kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal

INDIKATOR KINERJA	META INDIKATOR	SATUAN	KONDISI SAAT INI	Target Th 1	Target Th 2	Target Th 3	Target Th 4	Target Th 5
Kepuasan Pelayanan DPRD	Nilai survey kepuasan pelayanan kepada DPRD	%	80	82	83	93	94	95

SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME)

Sasaran OPD (Eselon II): Terfasilitasinya Kinerja DPRD

INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%	%	95.5	96	97	100	100

PROGRAM 1

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Meningkatnya jumlah Bahan Acara yang selesai sesuai agenda	Presentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	Jumlah Bahan Acara yang selesai dibagi jumlah Bahan Acara yang direncanakan x 100%	%	95.5	96	96	96.5	97.0

Kegiatan 1

Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang -undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD serta Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan	Tercapainya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	%	95.5	96	96	96.5	97.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	dokumen	10	10	10	10	10
Pembahasan Rancangan Perda						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	dokumen	16	16	16	16	16
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						
Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen	5	5	5	5	5
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik						
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	158	158	158	158	158
Penyusunan Tata Tertib DPRD						
Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a
Sosialisasi Peraturan Daerah yang						
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang	n/a	n/a	22000	23000	24000

Kegiatan 2

Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	95.5	96	96	96.5	97.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Pembahasan KUA dan PPAS						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	dokumen	2	2	2	2	2
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	2	2	2	2	2
Pembahasan APBD						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen	1	1	1	1	1
Pembahasan Perubahan APBD						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	dokumen	1	1	1	1	1
Pembahasan Laporan Semester						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	dokumen	1	1	1	1	1
Pembahasan Pertanggung jawaban APBD						
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen	1	1	1	1	1

Kegiatan 3

Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tercapainya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	95.5	96	96	96.5	97.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 3

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	laporan	7	5	5	6	5
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	laoran	5	5	5	5	5
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						
Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	laoran	5	5	5	5	5
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	laoran	5	5	5	5	5

Kegiatan 4

Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Penyusunan Program Kerja DPRD	Tercapainya Peningkatan Kapasitas DPRD	%	95.5	96.0	96.0	96.5	97.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 4

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Orientasi DPRD						
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	kali	n/a	1	n/a	n/a	n/a
Pendalaman Tugas DPRD						
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen	6	6	6	6	6
Publikasi dan Dokumentasi Dewan						
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen	16	16	16	16	16
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	18	18	18	18	18
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	7	7	7	7	7
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	33	33	33	33	33

Kegiatan 5

Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses	Tercapainya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%	95.5	96.0	96.0	96.5	97.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Kunjungan Kerja Dalam Daerah						
Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	laporan	n/a	60	60	60	60
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						
Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	dokumen	1	1	1	1	1
Pelaksanaan Reses						
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen	3	3	3	3	3

Kegiatan 6

Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Sub Kegiatan dari Kegiatan 6

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*) — TARGET

SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME)

Sasaran OPD (Eselon II): Terfasilitasinya Kinerja DPRD

INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Jumlah agenda yang terselesaikan dibagi jumlah agenda yang direncanakan x 100%	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100

PROGRAM 1

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Meningkatnya jumlah Bahan Acara yang selesai sesuai agenda	Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Diresmikannya / Dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Penetapan DPRD DIY oleh Pemerintah Pusat	%	n/a	n/a	n/a	n/a	1

Kegiatan 1

Kegiatan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Tercapainya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur	%	n/a	n/a	n/a	n/a	1

Sub Kegiatan dari Kegiatan 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY						
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	1

SASARAN STRATEGIS 2 (INTERMEDIATE OUTCOME)

Sasaran OPD (Eselon II): Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY

INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY	Nilai Kategori Reformasi Birokrasi	-	A	A (82,00)	A (88,76)	A (89,74)	A (90,00)

PROGRAM 2

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	META INDIKATOR	SATUAN	TARGET TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Kelancaran Pelayanan Dewan dan OPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diperoleh	%	88	88,5	89	89.5	89.5

Kegiatan 1

Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan *Medical*	Tercapainya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	orang/bulan	55	55	55	55	55
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	305	360	360	305	305
Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD						
Jumlah Orang yang Mengikuti *Medical Check Up* DPRD	orang	55	55	55	55	55

Kegiatan 2

Kegiatan Layanan Adminstrasi DPRD

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tercapainya Layanan Administrasi DPRD	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Fasilitasi Fraksi DPRD						
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	laporan	252	252	252	252	252
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	laporan	141	146	141	141	141

Kegiatan 3

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 3

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	5	5	5	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	4	4	4	4	4
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	3	3	3

Kegiatan 4

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 4

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan	80	90	100	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD						
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	12	12	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	13	13	13	13	13

Kegiatan 5

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 5

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	laporan	14	14	14	14	14

Kegiatan 6

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Administrasi Kepegawaian pada SKPD	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 6

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	16	16	16	16	16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	22	22	22	22	22

Kegiatan 7

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 7

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	8	8	8	8	8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	5	5	5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	5	5	5	5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD dan pengawasan kode etik DPRD	Tercapainya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	%	95.5	96.0	96.0	96.5	97.0

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	2023	2024	2025	2026	2027
Penyusunan Kode Etik DPRD						
Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	dokumen	n/a	1	n/a	n/a	n/a
Pengawasan Kode Etik DPRD						
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	laporan	3	3	3	3	3

Kegiatan 7

Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia	Tercapainya Fasilitasi Tugas DPRD	%	95.5	96.0	96.0	96.5	97.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 7

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET 2023	2024	2025	2026	2027
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	44	44	44	44	44
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						
Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	1	1	1	1
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	14	14	14	14	14
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	13	13	13	13	13
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen	n/a	n/a	n/a	28	28

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	2	2	2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24	24	24	24	24

Kegiatan 8

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pengadaan mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 8

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET				
		2023	2024	2025	2026	2027
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	4	n/a	n/a	n/a	n/a
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	n/a	n/a	4	n/a	n/a
Pengadaan Mebel						
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	n/a	10	10	n/a
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	110	110	110	110	110
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	n/a	1	1	n/a
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	n/a	3	n/a	3	n/a

Kegiatan 9

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 9

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET				
		2023	2024	2025	2026	2027
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	60	60	60	60	60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	60	60	60	60	60

Kegiatan 10

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Indikator Kegiatan	Capaian Kegiatan	SATUAN	Target				
			TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	100.0

Sub Kegiatan dari Kegiatan 10

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (*OUTPUT*)	SATUAN	TARGET				
		2023	2024	2025	2026	2027
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	5	5	5	5	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	29	29	29	29
Pemeliharaan Mebel						
Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	n/a	20	n/a	20	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	260	260	260	260	260
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	3	3	3	3
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	n/a	3	n/a	3	3

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	**Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen terdiri dari 2 dokumen kepwan propemperda (murni dan perubahan) dan 8 rekomendasi hasil pengkajian kelayakan raperda non APBD yang dibahas pansus
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen Bahan Acara yang dibahas Pansus
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen kajian kebijakan bidang tugas komisi bekerjasama dengan konsultan
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	158 dokumen	158 dokumen	158 dokumen	158 dokumen	158 dokumen	158 dokumen terdiri dari 153 draf rakepwan/raperwan/rakepim dan 5 draft raperda/raperdais inisiatif

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	1 keputusan	-	-	-	
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-	22000 Orang	23000 Orang	24000 Orang	jumlah peserta yang disosialisasikan
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen terdiri dari 1 dokumen KUA dan 1 dokumen PPAS
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen terdiri dari 1 dokumen KUPA dan 1 PPASP
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Persetujuan Bersama Raperda APBD
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dokumen Kompilasi Hasil Pembahasan Komisi
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7 laporan	5 laporan	5 laporan	6 laporan	5 laporan	5 laporan terdiri dari 1 laporan hasil kajian bahan pengawasan produk hukum dan 4 laporan hasil pengawasan komisi => tahun 2023 terdapat tambahan output 2 laporan hasil seleksi anggota KPID sesuai surat Diskominfo Nomor 900/01600 tanggal 27 Januari 2022 dan Seleksi Anggota KID => tahun 2026 terdapat tambahan output 1 laporan hasil seleksi anggota KID sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (masa jabatan 3 tahun)

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan terdiri dari 1 laporan hasil kajian bahan pengawasan produk hukum dan 4 laporan hasil pengawasan komisi
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan terdiri dari 1 laporan hasil kajian bahan pengawasan produk hukum dan 4 laporan hasil pengawasan komisi
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan	5 laporan terdiri dari 1 laporan hasil kajian bahan pengawasan produk hukum dan 4 laporan hasil pengawasan komisi
Peningkatan Kapasitas DPRD	**Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	-	1 kali	-	-	-	
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen hasil pendalaman tugas DPRD

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen terdiri dari 12 dokumen sosialisasi perda komisional dan 3 dokumen sosialisasi Perda gabungan komisi dan 1 dokumen sosialisasi peraturan perudangan dari pusat
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	18 orang	Komisi : 3 orang Pimpinan Dewan : 3 orang Badan Anggaran : 3 orang Badan Musyawarah : 3 orang Bapemperda : 3 orang Badan Kehormatan : 3 orang
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	1 orang x 7 Fraksi
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen terdiri dari: 22 dokumen audiensi, 5 dokumen sarasehan dan gathering, 4 dokumen kegiatan kemitraan wartawan dan 2 dokumen publikasi kinerja DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan hasil kunjungan kerja dalam daerah
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 kali pelaksanaan reses
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	1 dokumen	-	-	-	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	laporan BK setiap masa sidang
Fasilitasi Tugas DPRD	**Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**	**95.5%**	**96.00%**	**96%**	**96.50%**	**97.00%**	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen	44 dokumen terdiri dari: 22 dokumen kunjungan kerja luar negeri, 12 dokumen pelayanan keprotokolan kepada pimpinan DPRD dan 11 dokumen seminar kaukus parlemen perempuan
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen terdiri dari 12 dokumen jadwal bulanan dan 2 dokumen kepwan program kerja DPRD (murni dan perubahan)

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen terdiri dari: 12 dokumen kegiatan pimpinan dalam 1 tahun dan 1 dokumen terkait hasil survey kepuasan tamu DPRD yang terlayani
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	-	-	28 Dokumen	28 Dokumen	28 dokumen terdiri dari: 7 dokumen pansus perda dan 12 dokumen pansus pengawasan
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY	**Persentase Ketepatan waktu dan prosedur penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai UU**	-	-	-	-	100%	
Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	**Terlaksananya Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY**	-	-	-	-	100%	
Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	n/a	n/a	n/a	n/a	3 laporan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**88%**	**88.50%**	**89%**	**89.50%**	**89.50%**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Renja murni, renja perubahan, renstra, PK, ROPK
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	DPA SKPD, Laporan Hasil Koordinasi, DPPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang/bulan	90 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	100 orang/bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan	13 laporan terdiri dari 12 laporan bulanan dan 1 laporan semesteran
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	14 laporan	12 laporan bulanan pengurus barang dan 2 dokumen RKBMD dan RKPBMD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	lap bulanan 12, usulan kenaikan pangkat 2x setahun, lhkasn, lhkpn

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	22 orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket terdiri dari paket ATK, paket bendera merah putih, paket tabung pemadam kebakaran, persediaan kearsipan dan paket bahan kelengkapan pencegahan covid

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket terdiri dari paket peralatan rumah tangga seperti gelas, piring, sendok, garpu maupun nampan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	12 laporan rapat koordinasi dan 12 laporan koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	-	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	4 unit	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	-	10 paket	10 paket	-	merupakan mebel yang akan disediakan untuk gedung baru DPRD DIY dan kebutuhan mebel tahun 2023
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	110 unit	110 unit	110 unit	110 unit	110 unit	110 unit terdiri dari: laptop, komputer editing, scanner, printer, UPS, keyboard, LCD, LCD Proyektor, original lensa, konverter, kabel, magnetic whiteboard, kabel roll, double face, kulkas, meja komputer, dll
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	1 unit	1 unit	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	3 unit	-	3 unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	29 unit	29 unit	29 unit	29 unit	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	20 unit	-	20 unit	20 unit	merupakan mebel yang akan disediakan untuk gedung baru DPRD DIY
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	260 unit	260 unit	260 unit	260 unit	260 unit	260 unit terdiri dari 256 unit sesuai dengan keluaran tahun 2022, ditambah dengan 3 unit TV LED dan jaringan internet di 150 titik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3 unit	-	3 unit	3 unit	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	55 orang/bulan	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	305 paket	360 paket	360 paket	305 paket	305 paket	305 paket terdiri dari: 55 paket pakaian dinas berciri khas daerah dan 250 paket pakaian dinas, untuk Tahun 2024 dan 2025 Pakaian Dinas Dewan tambah 55 Stel PSL (sesuai PP 18 tahun 2017)
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	55 orang	
Layanan Administrasi DPRD	**Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	252 laporan	252 laporan	252 laporan	252 laporan	252 laporan	252 laporan terdiri dari: 84 laporan pemandangan akhir fraksi, 84 laporan pemandangan umum fraksi dan 84 laporan rekomendasi fraksi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program *(outcome)*, Kegiatan *(output)*, dan subkegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Keterangan
		Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	141 laporan	146 laporan	141 laporan	141 laporan	141 laporan	141 laporan terdiri dari : 2 laporan hasil konsultasi delegasi ke pusat dan 12 laporan hasil rapat koordinasi konsultasi DPRD, 7 laporan hasil rapur dan 120 laporan merupakan laporan tamu bulanan yang diasumsikan terdapat 10 grup kunjungan tamu setwan dalam 1 bulan. Untuk tahun 2024 terdapat tambahan rapat paripurna yaitu Pelantikan anggota dewan baru periode 2024-2029, penetapan pimpinan sementara, pelantikan pimpinan definitif, penetapan anggota AKD dan penetapan pimpinan AKD (Komisi, BK, Bapem, Banggar, Bamusy)

FINAL OUTCOME

OUTCOME

INTERMEDIATE OUTCOME

Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan tepat waktu
IK : Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Crosscutting : Presiden dan Wakil Presiden, K/L, TAPD Pemda DIY, Biro Tapem, Biro Hukum, Biro Organisasi, Paniradya Kaistimewan

Terpenuhinya Pengawasan Pelaksanaan Urusan Keistimewaan
IK: Persentase Bahan Acara Pengawasan Urusan Keistimewaan yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (%)

Crosscutting : K/L, TAPD Pemda DIY, Paniradya Kaistimewan, OPD Pemda DIY

IMMEDIATE OUTCOME

Terlaksananya Fasilitasi Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tepat waktu
IK : Terlaksananya Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Terlaksananya Koordinasi Lintas Perangkat Daerah yang Efektif Efisien

Tersedianya Data dan Informasi yang Akurat

Terselenggaranya Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara
IK: Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara (%)

Terselenggaranya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Keistimewaan
IK: Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Urusan Keistimewaan (%)

Terlaksananya Kepatuhan perangkat daerah pelaksana terhadap regulasi

Terpenuhinya Mekanisme pengawasan yang jelas dan terstruktur

Tersedianya data & laporan yang akurat & tepat waktu

Terselenggaranya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
IK : Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang undangan, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

OUTPUT

Terlaksananya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Terlaksananya Koordinasi lintas lembaga (Pusat, Daerah, DPRD, Keraton/Pakualaman)

Tersedianya jadwal, tahapan, dan prosedur yang jelas

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara

IK: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai regulasi

Terlaksananya Koordinasi antar perangkat daerah yang efektif

Tersedianya data & indikator yang akurat

Terlaksananya Mekanisme pengendalian & monitoring yang jelas

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY

IK: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY

Tersedianya dokumen perencanaan sesuai regulasi

Terlaksananya Sinkronisasi perencanaan dengan RPJMD/RKPD

Terlaksananya Mekanisme monitoring & evaluasi terstruktur

Terselenggaranya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah Istimewa

Terselenggaranya Pembahasan Rancangan Perda/Perdais
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda/Perdais

Terselenggaranya Penyusunan Kajian Perundang-Undangan
IK : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan

Terfasilitasinya Penyusunan Naskah Akademik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi

Terselenggaranya Penyusunan Tata Tertib DPRD
IK : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun

Terlaksananya Sosiali
Peraturan Daerah y
Dilakukan Bersama
DPRD
dan Pemerintah Dae
IK : Jumlah Peserta y
mengikuti sosialisasi p

Keterbatasan Anggaran
Issu Prioritas
Diintervensi pada Tujuan Lain
Diluar Supslai OPD

Terwujudnya layanan atas kinerja dan aktivitas DPRD yang optimal

IK : Kepuasan atas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Meningkatnya fasilitasi Kinerja DPRD

IK : Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)

Terpenuhinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

IK : Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY (%)

Meningkatnya Kualitas Dukungan Administrasi dan Kesekretariatan

Terlaksananya Efektivitas Fasilitasi Rapat, Sidang, dan Kegiatan DPRD

Crosscutting: K/L, TAPD Pemda DIY, OPD Pemda DIY, Masyarakat, Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Setwan Kab/Kota

Terselenggaranya Pembahasan Kebijakan Anggaran

IK : Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD

Terselenggaranya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

IK : Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahaan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

sasi
ang
oleh
rah
ang
erda

Terlaksananya Kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan

Terlaksananya Koordinasi antara DPRD, Pemda, & Sekretariat yang baik

Terlaksananya konsultasi dan kunjungan kerja DPRD

Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS

Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Terlaksananya Pembahasan APBD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD

Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD

Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester

Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Tersedianya dokumen anggaran yang lengkap & tepat waktu

Terlaksananya Kepatuhan terhadap regulasi penganggaran

Terlaksananya ketepatan waktu hasil evaluasi APBD maupun APBD Perubahan dari Kemendagri

Terlaksananya konsultasi dan kunjungan kerja DPRD

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
IK : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Tersedianya data & laporan kinerja pemerintahan

Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran

Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

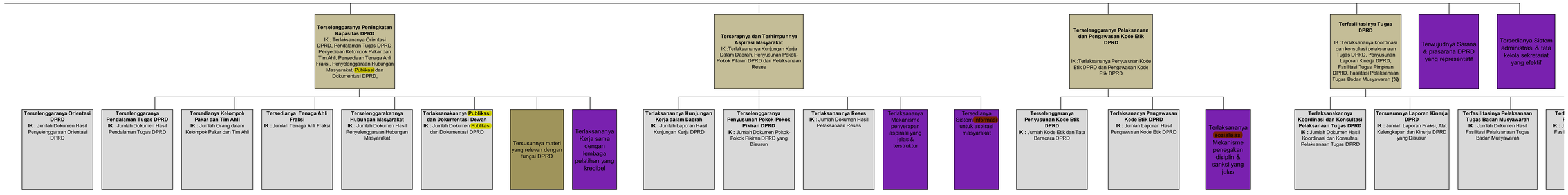
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD
IK : Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Dokumentasi DPRD,
Terselenggaranya Orientasi DPRD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
Terselenggaranya Pendalaman Tugas DPRD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli
IK : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi
IK : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
Terselenggarakannya Hubungan Masyarakat
IK : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Terlaksanakannya Publikasi dan Dokumentasi Dewan
IK : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD
Tersusunnya materi yang relevan dengan fungsi DPRD
Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga pelatihan yang kredibel
Terserapnya dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat
IK :Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses
Terlaksanannya Kunjungan Kerja dalam Daerah
IK : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
Terselenggaranya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
IK : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
Terlaksanannya Reses
IK : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
Terlaksananya Mekanisme penyerapan aspirasi yang jelas & terstruktur
Tersedianya Sistem informasi untuk aspirasi masyarakat
Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
IK :Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Terselenggaranya Penyusunan Kode Etik DPRD
IK : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD
IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
Terlaksananya sosialisasi Mekanisme penegakan disipin & sanksi yang jelas
Terfasilitasinya Tugas DPRD
IK :Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (%)
Terlaksanakannya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD
IK : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
IK : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Terwujudnya Sarana & prasarana DPRD yang representatif
Tersedianya Sistem administrasi & tata kelola sekretariat yang efektif

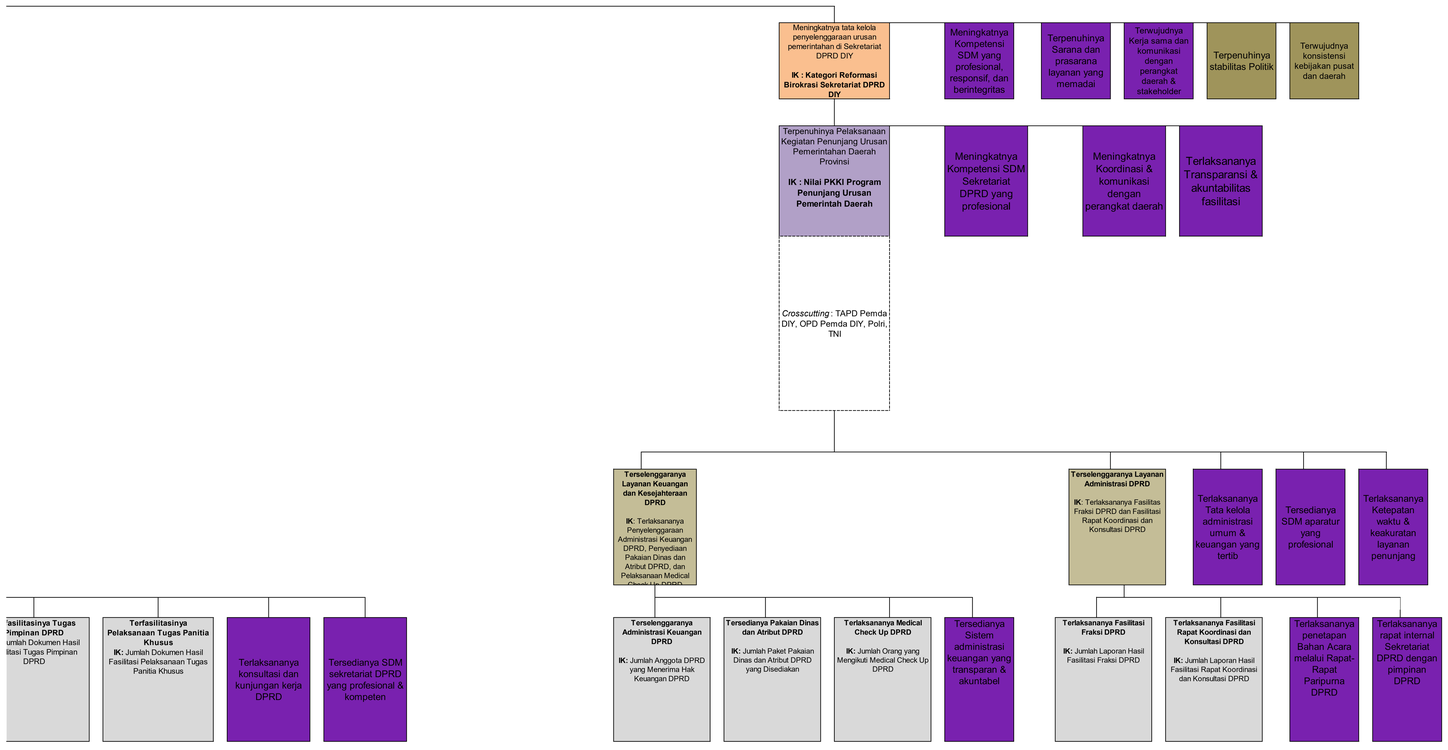
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Sekretariat DPRD DIY
IK : Kategori Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD DIY
Meningkatnya Kompetensi SDM yang profesional, responsif, dan berintegritas
Terpenuhinya Sarana dan prasarana layanan yang memadai
Terwujudnya Kerja sama dan komunikasi dengan perangkat daerah & stakeholder
Terpenuhinya stabilitas Politik
Terwujudnya konsistensi kebijakan pusat dan daerah
Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
IK : Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kompetensi SDM Sekretariat DPRD yang profesional
Meningkatnya Koordinasi & komunikasi dengan perangkat daerah
Terlaksananya Transparansi & akuntabilitas fasilitasi
Crosscutting : TAPD Pemda DIY, OPD Pemda DIY, Polri, TNI
Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
IK: Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical
Terselenggaranya Layanan Administrasi DPRD
IK: Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Terlaksananya Tata kelola administrasi umum & keuangan yang tertib
Tersedianya SDM aparatur yang profesional
Terlaksananya Ketepatan waktu & keakuratan layanan penunjang
asilitasinya Tugas Pimpinan DPRD
umlah Dokumen Hasil itasi Tugas Pimpinan DPRD
Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
IK: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Terlaksananya konsultasi dan kunjungan kerja DPRD
Tersedianya SDM sekretariat DPRD yang profesional & kompeten
Terselenggaranya Administrasi Keuangan DPRD
IK: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
IK: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan
Terlaksananya Medical Check Up DPRD
IK: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD
Tersedianya Sistem administrasi keuangan yang transparan & akuntabel
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
IK: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Terlaksananya penetapan Bahan Acara melalui Rapat-Rapat Panpurna DPRD
Terlaksananya rapat internal Sekretariat DPRD dengan pimpinan DPRD

Formulir E. 27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
SEKRETARIAT DPRD DIY
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja.	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi.		√	Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD DIY tidak ada yang berasal dari usulan kabupaten/kota	Tidak ada Penyempurnaan
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi.	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi.	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis.	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi.	√			
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.	√			
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi.	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi.	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.	√			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi.	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	√			
20.	Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan.	√			

Yogyakarta, 8 Juni 2026
Sekretaris DPRD DIY,

YUDI ISMONO, S.Sos.,M.Acc.
NIP. 197107171996031004

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta

Telp. : (0274) 512688 Fax. : (0274) 580692

Surel : setwan@dprd-diy.go.id

Laman : dprd-diy.go.id